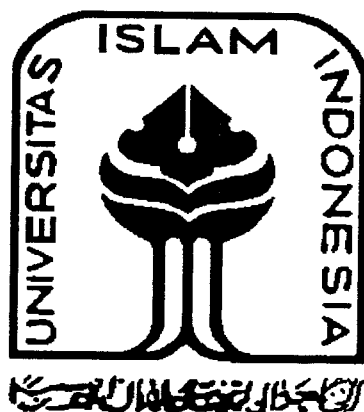


**IMPLIKASI INTENSIFIKASI PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1985-2000
PENDEKATAN PARTIAL ADJUSMENT MODEL
(PAM)**



SKRIPSI

Disusun Oleh :

SULISTIYAH

**No. Mahasiswa : 97313063
No. NIRM : 9700511011301220062**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2002**

**IMPLIKASI INTENSIFIKASI PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1985-2000
PENDEKATAN PARTIAL ADJUSTMENT MODEL
(PAM)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Disusun Oleh :

SULISTIYAH

No. Mahasiswa: 97313063
No. NIRM : 9700511011301220062

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI INTENSIFIKASI PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1985-2000
(PARTIAL ADJUSTMENT MODEL)**

Yogyakarta, 3 April 2002

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Jaka Sriyana, Msi', written over a horizontal line.

(Drs. H. Jaka Sriyana, Msi)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL:

IMPLIKASI INTENSIFIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
1985 - 2000

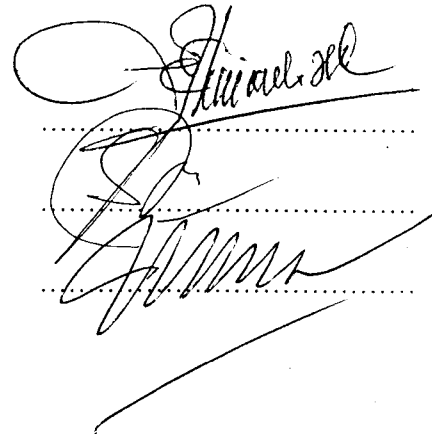
Disusun Oleh: SULISTIYAH
Nomor Mahasiswa: 97313063

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
pada tanggal 14 Mei 2002

Penguji I : DRS. NUR FERIYANTO, M.SI

Penguji II : DRS. SUHARTO, M.SI

Pembimbing Skripsi: DRS. H. JAKA SRIYANA, M.SI



Handwritten signatures of the examiners and supervisor, with dotted lines indicating the names of the examiners.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. H. Suwarsono, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini ku persembahkan untuk :

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Yang telah memperkenalkan Warna Dunia

Adik-adikku tersayang

Yang senantiasa tersenyum untuk kebahagiaan Aku

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatannya.”

(Al-Baqaroh : 286)

*Semalam adalah sejarah yang tidak boleh dipindah,
Esok adalah impian yang belum nyata
Hari ini adalah kenyataan dan penentu siapa kita.*

(DR. Tengku Asmadi)

“Orang sukses tidak mencari keajaiban, jalan pintas, atau memilih tugas-tugas ringan. Mereka mencari keberanian dan kekuatan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. Mereka melihat pada apa yang masih ada ketimbang apa yang sudah hilang. Mengharap saja tak akan membuat impian jadi kenyataan. Tapi harus didukung dengan kepercayaan dan keyakinan. Doa-doa akan dikabulkan jika didukung dengan tindakan berani. Keberanian dan karakter adalah perpaduan yang hebat untuk sukses. Inilah yang membedakan antara orang yang biasa dengan orang yang luar biasa.”

(You Can Win, Shiv Khera)

*“Rahasia hidup tidak berubah. Yang masih merupakan yang terbaik adalah:
Jujur, bisa dipercaya, menjadi yang paling baik dari yang Anda bisa,
berbahagia dengan hal-hal sederhana, dan tetap teguh jika yang terjadi tidak seperti yang Anda inginkan.”*

(Laura Ingalls Wilder)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLIKASI INTENSIFIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1985-2000: PENDEKATAN PARTIAL ADJUSMENT MODEL (PAM)”**. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari kekurangan atau kelemahan, maka penulis menyadari bahwa tanpa pihak-pihak yang membantu, maka penulisan skripsi ini tidak mungkin berjalan sesuai dengan kenyataan yang diinginkan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Bapak Drs. H. Jaka Sriyana, Msi, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Ayahanda dan Ibunda tercinta, de'Toto, de'Endah atas doa, perhatian dan nasehat yang selama ini diberikan kepada *Aku*.

4. Seluruh Dosen di jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis.
5. Seluruh karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu dalam mencari bahan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ndari dari perpustakaan Badan Pusat Statistik yang telah membantu mencari data.
7. Keluarga Besar Tegal Senggotan 27A terima kasih banyak atas, perhatian dan nasehat yang selama ini diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Novi, Abid, Nenik Inok, Eno, Dina, Heru, Candra, Nurul sahabat seperjuangan yang telah banyak memberi motivasi dan doa kepada penulis
9. Yang tidak akan terlupakan sahabatku Anita Rimayanty terima kasih banyak untuk semua bantuannya.
10. Mas Ismanto terima kasih banyak atas bantuannya yang telah diberikan kepada *Aku*, sehingga *Aku* dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Mas Catur terima kasih banyak, untuk waktunya, bimbingannya, *Aku* nggak akan lupa bantuan *You* selama ini.
12. Inoy sayang *Thank You* untuk curhatnya selama ini, *Aku* doakan semoga *You* selalu dalam lindungan Allah SWT, sukses selalu menyertaimu.
13. Om Sis, Buliek Sri, Bowo dan Shafira sayang, terima kasih untuk doa dan nasehatnya.
14. Keluarga Besar *Kiwi, Kedaton* terima kasih untuk doa nasehat dan bimbingannya, yang telah diberikan kepada *Aku*.

Penulis menyadari dan merasa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dari penulisan skripsi ini, Karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.

Semoga amal baik dan bantuan yang ikhlas yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya dalam segala kekurangannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamm'ualaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 4 April 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Hipotesis.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1.Data dan sumber Data.....	9
1.6.2.Metode Analisis Data.....	10
1.6.3.Pengujian Hipotesis.....	11
1.6.4.Pengujian Asumsi Klasik.....	14
1.7. Sistematika Penulisan	16

BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
	2.1. Spesifikasi Dinamis Model Investasi Jangka Panjang.....	17
	2.2. Implikasi Intensifikasi Pendapatan Daerah terhadap Perekonomian DIY tahun 1981-1996.....	19
	2.3. Disparitas Alokasi Investasi Regional di Indonesia.....	20
	2.4. Tingkat Fiskal Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.....	21
BAB III	LANDASAN TEORI	
	3.1. Tingkat Fiskal Daerah.....	24
	3.2. Pokok-pokok Kebijakan Keuangan Daerah.....	25
	3.3. Tolak Ukur Pendapatan Asli Daerah.....	29
	3.4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	29
	3.5. Kemampuan Politik.....	31
	3.6. Penerimaan Pemerintah.....	32
	3.7. Pendapatan Daerah.....	32
	3.7.1. Pendapatan Asli Daerah.....	32
	3.8. Penerimaan Daerah Sebagai Investasi.....	40
	3.8.1. Jenis-jenis Investasi.....	41
	3.8.2. Peranan Investasi.....	43
	3.9. Pengaruh Masing-masing Variabel terhadap Pendapatan....	44
	3.9.1. Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan.....	45
	3.9.2. Pengaruh Angkatan kerja terhadap Pendapatan.....	46

3.9.3. Pengaruh Penduduk terhadap Pendapatan.....	46
---	----

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
4.1.	Sejarah.....	48
4.2.	Keadaan Geografi.....	49
4.3.	Iklim.....	50
4.4.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	50
4.5.	Angkatan Kerja.....	53
4.6.	Komposisi Angkatan Kerja.....	54
4.7.	Laju Perkembangan PDRB DIY.....	55
4.8.	Perkembangan PDRB Perkapita.....	57
4.9.	Perkembangan SP PMA/PMDN menurut Lokasi DATI II.	58

BAB V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
5.1.	Data dan Sumber Data.....	61
5.1.1.	Data.....	61
5.1.2.	Sumber Data.....	62
5.2.	Analisis Hasil Regresi.....	62
5.2.1.	Hasil Regresi.....	63
5.2.2.	Pengujian Secara Parsial.....	64
5.2.3.	Pengujian Secara Serentak.....	66
5.2.4.	Koefisien Determinasi (R^2).....	66
5.2.5.	Uji Penyesuaian.....	67

5.3. Uji Asumsi Klasik.....	67
5.3.1. Pengujian Multikolinearitas.....	67
5.3.2. Pengujian Heteroskedastisitas.....	69
5.3.3. Pengujian Autokorelasi.....	70

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	72
6.2. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Tabel 5.3.1 Pengujian Multikolinearitas.....	68
Tabel 5.3.2 Pengujian Heteroskedastisitas.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Investasi Terpengaruh dan Investasi Aotonomi.....	42
Gambar 3.2. Pengaruh Investasi terhadap AD dan AS.....	44

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto DIY tahun 1985-2000.....	6
Tabel 2.1. Hasil Estimasi Spesifikasi Model Dinamis Investasi Jangka Panjang.....	17
Tabel 2.2. Hasil Estimasi Disparitas Alokasi Investasi Regional di Indonesia...	20
Tabel 2.3. Hasil Estimasi Tingkat Fiskal Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.....	22
Tabel 4.1. Rata-rata penduduk per tahun menurut propinsi di pulau Jawa dan Bali tahun 1971-1999.....	51
Tabel 4.2. Kepadatan Penduduk di propinsi DIY tahun 1990-2000.....	52
Tabel 4.3. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di propinsi DIY tahun 1998-2000.....	52
Tabel 4.4. Tingkat TPAK dan Angka Pengangguran Tenaga kerja di propinsi Tahun 1998-2000.....	53
Tabel 4.5. Tingkat TPAK.....	55
Tabel 4.6. Perkembangan Penanaman Modal PMA/PMDN di propinsi DIY Selama Pelita VI 1994/1995-1998/1999.....	59
Tabel 4.7. Penanaman Modal PMA/PMDN Berdasarkan Lokasi Tingkat II Selama Pelita VI.....	60
Tabel 5.1. Hasil Estimasi.....	62.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara adalah proses perubahan yang terus menerus dan kemajuan atau perbaikan-perbaikan kearah suatu tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut pembangunan ekonomi dapat diartikan, pertama usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat; kedua kenaikan pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat itu harus berlangsung terus dalam jangka panjang (Jaka Sriyana, 1996).

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalangkan prakarsa, peran dan serta aktif masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan.

Pembiayaan pembangunan daerah pada dasarnya didukung oleh tiga kelompok sumber dana; pertama, dana Pendapatan Asli Daerah. (PAD) ; kedua alokasi dari pusat; dan ketiga dana melalui investasi swasta. Berbicara mengenai investasi baik asing atau domestik pada kondisi sekarang ini memang sangat mengawatirkan, ini disebabkan negara kita sedang mengalami ketidakstabilan

baik sektor ekonomi, sektor politik maupun budaya. Dimana kita telah tahu bahwa penanaman modal sangat berpengaruh terhadap kondisi negara yang stabil dari segala bidang dan ini akan memberikan kepercayaan kepada para investor yang akan menanamkan modalnya di negara kita.

Perkiraan besarnya investasi menurut sumbernya secara garis besar dapat dibagi atas (1) investasi pemerintah (2) investasi non pemerintah. Investasi pemerintah berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam bantuan proyek sektoral dan program bantuan inpres, APBD daerah yang bersangkutan. Sedangkan investasi non pemerintah bersumber dari laba perusahaan swasta yang ditanam kembali, PMDN, PMA, Kredit, Investasi, serta dana-dana yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri (Sadono Sukirno 1985 : 117) sedangkan menurut Paul Samuelson dan William D. Nordhaus investasi adalah aktifitas ekonomi yang mengorbankan konsumsi hari ini untuk meningkatkan output dimasa datang. Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam usaha-usaha bersifat produktif dengan tujuan akan memperoleh keuntungan dari investasi yang ditanamkan.

Tanpa adanya dana yang cukup, ciri pokok dan mendasar dari otonomi daerah menjadi hilang oleh karena itu pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerahnya agar tidak selalu tergantung pada bantuan pemerintah

pusat. Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No 25 tahun 1999 terdiri dari empat bagian besar yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah
- d. Penerimaan dari Dinas-dinas
- e. Penerimaan lain-lain yang sah

2. Dana perimbangan yang terdiri dari :

- a. Bagian Daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam.
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

3. Pinjaman Daerah

- a. Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya, pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat.
- b. Pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembiayaan kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

4. Lain-lain penerimaan yang sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting untuk menilai kemandirian pemerintah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan Pendapatan

Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan dalam pembangunan.

Secara umum dikemukakan ada beberapa sumber strategis dan dominan yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Salah satu pengklarifikasian adalah faktor-faktor fisik dan faktor manajemen. Secara spesifik ada tiga faktor komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah angkatan kerja berarti semakin produktif, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik (Todaro 1997 : 104).

Kesimpulannya adalah bahwa adanya suatu teori ekonomi yang mengatakan apabila jumlah penduduk dalam suatu daerah semakin bertambah maka akan dapat meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat daerah itu sendiri, untuk itu, untuk bertambahnya konsumsi masyarakat maka secara tidak langsung akan meningkatkan produktifitas terhadap tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perkapita daerah tersebut untuk dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil proyeksi Survey Penduduk Antar Sensus (SuPAS) 1995, pada tahun 1999 jumlah penduduk di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1,48% dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.264.942 jiwa dengan persentase jumlah penduduk perempuan adalah 48,43% dan penduduk laki-laki adalah 50,57%. Data tenaga kerja hasil Sakernas tahun 1999

menunjukkan bahwa penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang berusia 15 tahun keatas adalah 2.275.620 jiwa terdiri dari 69,61% adalah angkatan kerja dan 30,39% bukan angkatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan perhitungan sementara nilai Produk Domestik Bruto (PDB) propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2000 diperkirakan mencapai Rp. 4,92 triliun, atau tumbuh 3,90% dibanding Produk Domestik Regional Bruto propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1999 (atas dasar harga konstan 1993) sebesar Rp. 4,74 triliun. Dibanding angka estimasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2000 sebesar 4,8% perkiraan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut lebih rendah, namun laju pertumbuhan tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997.

Meskipun dihadapkan pada kondisi yang serba tidak pasti, perekonomian nasional pada umumnya dan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya masih mengalami pertumbuhan yang positif dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana tercermin dari perkiraan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2000 masing-masing sebesar 4,8% dan 3,9%. Angka tersebut relatif lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi dunia yang pada periode sama diperkirakan sebesar 3,4%.

Tabel 1.1
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)DIY
 Tahun 1985-2000

TAHUN	PDRB
1985	993700
1986	1162126
1987	1300109
1988	1486980
1989	1651484
1990	1900530
1991	2200862
1992	2500866
1993	4135529
1994	4969848
1995	5709735
1996	6503905
1997	7233677
1998	98633894
1999	11762984
2000	12967040

Sumber : BPS Yogyakarta , berbagai edisi

Seperti yang telah ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pola dasar pembangunan di Daerah

Istimewa Yogyakarta berisi kebijaksanaan dan arah pembangunan yang merupakan penjabaran dari GBHN dengan memperhatikan kondisi objektif dan karakter dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun demikian perekonomian nasional tidak akan terlepas dari perekonomian daerah, dimana perekonomian daerah harus mampu merumuskan sektor ekonomi daerah, khususnya bagi propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Melalui cara tersebut sebenarnya daerah dapat saja tumbuh secara serasi, sesuai dan seimbang serta tidak minus jika daerah dapat mengembangkan dirinya dengan mendasarkan pada sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang dimiliki.

Maka dari uraian diatas menarik perhatian penulis untuk melihat kembali lebih lanjut, dari keadaan tersebut maka penulis mengambil judul **“IMPLIKASI INTENSIFIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1985-2000”**

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar Investasi mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Seberapa besar jumlah Angkatan kerja mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 3) Seberapa besar jumlah Penduduk mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan memperhatikan faktor-faktor dalam menganalisa permasalahan, maka perlunya diperhatikan beberapa variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Variabel-variabel tersebut adalah :

- 1) Jumlah Investasi Dalam Negeri di Propinsi Dearah Istimewa Yogyakarta
- 2) Jumlah Angkatan kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Jumlah Penduduk di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi DIY
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah Angkatan kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat terutama adalah :

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan landasan berpijak serta pertimbangan-pertimbangan terhadap penelitian yang akan datang
- 2) Untuk memperoleh bahan perbandingan antara yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada
- 3) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kebijakan keuangan daerah terutama dalam pengeluaran pembangunan
- 4) Bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut

1.5. Hipotesis

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut :

- 1) Bahwa jumlah Investasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- 2) Bahwa jumlah Angkatan kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- 3) Bahwa jumlah Penduduk di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diambil langsung dari lapangan tetapi data yang telah diolah dan

diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berkompeten, yaitu Badan Pusat Statistik, Dinas Pendapatan Daerah, dan data kepustakaan yang diperoleh berdasarkan hasil tinjauan berbagai buku, jurnal, majalah, dan artikel yang berkaitan.

1.6.2. Metode Analisis Data

1.6.2.1. Metode Kualitatif

Metode yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang tidak dapat diukur atau menggunakan analisis yang sifatnya menguraikan dalam bentuk kalimat.

1.6.2.2. Metode Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi dengan data runtut waktu (time series) dari tahun 1985-2000. Analisis ini menggunakan persamaan non linier. Secara umum persamaannya dituliskan sebagai berikut :

Model

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} \dots e_i$$

Regresi persamaan dalam tingkat non linier yaitu dengan terlebih dahulu mentransformasikan persamaan tersebut dalam bentuk logaritma sebagai berikut :

$$\ln \text{PAD} = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{Inv} + \beta_2 \ln \text{Ak} + \beta_3 \ln \text{Pddk} + \dots e_i$$

Spesifikasi model :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Inv : Penerimaan investasi

Ak	: Angkatan kerja
Pddk	: Penduduk
β_0	: Koefisien variabel tetap
$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$: Koefisien regresi
e_i	: Faktor disturbance (faktor lain yang tidak dapat diteliti atau tidak ada datanya)

Berkaitan dengan studi empiris ini untuk menganalisis data yang diperoleh, model dasar dari persamaan estimasi OLS akan dikembangkan menjadi model dinamis dan menaksir model Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan model penyesuaian parsial (Partial Adjustment Model).

Model ini lebih dari dua dekade digunakan dengan sukses untuk analisis ekonomi. Pendekatan ini juga diterapkan di Indonesia dan menumbuhkan beberapa keberhasilan atau kemampuan dalam menjelaskan pengalaman sektor di Indonesia. (Insukindro 1990 : 93-94)

Sebagaimana diketahui, untuk model PAM ini memasukkan unsur kelambanan (lag) dari variabel dependennya, sehingga modelnya sebagai berikut :

$$LPAD = \beta_0 + \beta_1 LInv + \beta_2 LAk + \beta_3 LPddk + \beta_4 LPAD (-1)$$

1.6.3. Pengujian Hipotesis

1.6.3.1. Pengujian R^2

Pengujian R ini dimaksudkan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Semakin besar nilai R maka semakin baik hubungan variabel tersebut, R mempunyai nilai antara -1 sampai 1 ($-1 < R < 1$). Demikian juga dengan R^2 atau koefisien determinasi yaitu mengukur

seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen R^2 ini nilainya antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$).

1.6.3.2. Pengujian hipotesis dengan t-statistik

Dalam uji ini akan dilihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Pengujian terhadap variabel investasi, angkatan kerja, jumlah penduduk.

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad i = 1,2,3,4,k$$

Variabel independen tidak mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah di propinsi Yogyakarta.

$$H_a : \beta_1 \neq 0 \quad i = 1,2,3,4,k$$

Variabel independen mempengaruhi variabel dependen

Jika $t\text{-hit} < t\text{-tab}(\alpha, n-1-k)$ Ho diterima

Jika $t\text{-hit} > t\text{-tab}(\alpha, n-1-k)$ Ho ditolak

Dimana :

k = Jumlah variabel

n = Jumlah pengamat

Bila Ho ditolak berarti variabel bebas yang bersangkutan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya bila Ho diterima artinya variabel yang bersangkutan tidak (signifikan) berpengaruh terhadap variabel tak bebasnya.

1.6.3.3. Pengujian Hipotesis dengan F- statistik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independennya yang ada dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$$

Berarti secara beresama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

$$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4$$

Jika $F_{\text{hit}} < F_{\text{tabel}} [F(k, n-1-k)] \dots \dots \dots H_0$ diterima

Jika $F_{\text{hit}} > F_{\text{tabel}} [F(k, n-1-k)] \dots \dots \dots H_0$ ditolak

Dimana :

k = Jumlah variabel

n = Jumlah Pengamat

Bila H_0 ditolak berarti variabel tersebut baik untuk dijadikan penduga parameter dan persamaan.

1.6.3.4. Uji Penyesuaian

Uji penyesuaian dilakukan untuk mengetahui percepatan penyesuaian yang terjadi. Apabila penyesuaian tersebut kurang dari satu maka penyesuaian tersebut relatif lambat. Model penyesuaian adalah $0 < \lambda < 1$ apabila hal itu sudah terpenuhi maka akan mengalami penyesuaian dan penyesuaian sempurna adalah sebesar 1, sedangkan apabila penyesuaian tersebut negatif maka model tersebut gagal.

1.6.4. Pengujian Pelanggaran Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas pada hasil estimasi. Apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, uji F dan faktor yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.

1.6.4.1. Pengujian Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun rangkaian waktu. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, maka digunakan percobaan dari Durbin Watson statistik. Statistik d dari Durbin Watson mungkin tidak bisa digunakan untuk mendeteksi serial korelasi (derajat pertama) dalam autoregresif, karena nilai d yang dihitung dalam model biasanya mendekati 2, yang merupakan nilai d yang diharapkan dalam suatu urutan yang benar-benar random. Durbin mengusulkan suatu pengujian sampel besar dari korelasi serial derajat pertama dalam model autoregresif. Pengujian ini disebut statistik h yaitu :

$$h = (1 - \frac{1}{2} d) \sqrt{\frac{N}{1 - N [\text{var}(\alpha_2)]}}$$

N = Varian koefisien dari lag Y_{t-1}

$\text{Var}(\alpha)$ = Varian koefisien dari lag y_{t-1}

$1-\frac{1}{2}$ = Taksiran serial korelasi derajat pertama

1.6.4.2. Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians. Konsekuensi heteroskedastisitas adalah biasanya varians sehingga uji signifikan menjadi invalid. Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melakukan *Uji Glesjer* dilakukan dengan cara meregresi logaritma residual kuadrat terhadap semua variabel penjelas. Perhatikan nilai t-statistik yang dihasilkan, apabila signifikan, berarti varians regresi yang diestimasi adalah heteroskedastik.

1.6.4.3. Pengujian Asumsi Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel dependen dinyatakan sebagai kombinasi linier variabel independen lainnya.

Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan langkah pengujian terhadap masing-masing variabel independen (*uji klien*). Untuk mengetahui seberapa jauh korelasinya (r^2) yang kemudian dapat dibandingkan dengan R^2 yang didapat dari hasil regresi secara bersama-sama variabel independen dengan variabel dependen.

Jika ditemukan r^2 melebihi R^2 pada model penelitian, maka dari model tersebut terdapat multikolinearitas, dan sebaliknya bila R^2 lebih besar dari r^2 maka ini

menunjukkan tidak terdapatnya multikolinearitas pada model persamaan yang diuji (Damodar Gujarati 1997 : 57-58)

1.7. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan dari penelitian ini secara garis besar adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini

BAB III LANDASAN TEORI

Mengenai landasan teori, dalam bab ini akan dikemukakan teori-teori yang relevan dari definisi-definisi yang berkaitan serta sebagai landasan dasar dari penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Tentang gambaran DIY yang meliputi, deskripsi wilayah DIY, pertumbuhan ekonomi DIY, perkembangan PDRB perkapita DIY.

BAB V ANALISA DATA

Mengenai analisa data dikemukakan hasil perhitungan analisa data

BAB VI KESIMPULAN

Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan dari hasil-hasil analisa data pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian menganalisa Spesifikasi Dinamis Model Investasi Jangka Panjang :
Sebuah studi kasus di daerah Maluku oleh Elia Radianto dengan menggunakan model PAM.

a. variabel yang digunakan :

IRR = Investasi Realisasi Riil, meliputi PMA dan PMDN yang dalam penelitian ini dianggap sebagai investasi swasta di Maluku.

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

RDT = Suku bunga deposito tertimbang pada bank-bank pemerintah

AK = Angkatan kerja

b. Model Regresi yang digunakan adalah

Salah satu model dinamis yaitu Partial Adjustment Model (PAM)

Spesifikasi modelnya adalah sebagai berikut :

$$LIRR = \alpha_0 + \alpha_1 LPDRB + \alpha_2 RDT + \alpha_3 LAK + \alpha_4 BLIIR$$

c. Hasil estimasinya adalah sebagai berikut :

Estimasi model PAM dengan OLS

Tabel 2.1. Hasil Estimasi Spesifikasi Dinamis Model Investasi Jangka Panjang

Variabel	LIRR
Constanta	-2,4910
	-1.8813
LPDRB	0.1409

	(0.5814)
RDT	-0.0028883
	(-0.1773)
LAK	-2.2649
	(-201407)
BLIIR	1.0534
	(7.1463)

R² : 0.9887

Normalitas : 0.4653

DW : 2.2928

Multikolinearitas : 12.7956

Linearitas : 1.8672

Heteroskedastisitas : 1.8955

Autokorelasi : 1.4948

d. Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa dengan metode PAM mekanisme penyesuaian melalui koefisien BLLIR dapat diterima secara statistik dan sangat meyakinkan pada derajat kepercayaan $\alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme model penyesuaian investasi dapat digunakan untuk melihat pengaruh jangka panjang variabel-variabel yang digunakan dalam investasi.

Namun demikian hasil uji paper ini menunjukkan bahwa nilai investasi di daerah Maluku belum sepenuhnya baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai investasi yang belum mencerminkan semua informasi yang ada. Sebagai contoh variabel PDRB dan tingkat suku bunga (RDT) tidak signifikan atau

tidak dapat menjelaskan variasi investasi swasta. Hanya variabel angkatan kerja yang mampu menjelaskan variasi investasi swasta.

2 Penelitian terhadap Implikasi Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Daerah Terhadap Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Achmad Lufian Amirul mahasiswa UII Tahun 1981-1996 dengan menggunakan model Ordinary Least Square (OLS).

a. Variabel yang digunakan :

Y = Pendapatan Daerah

X_1 = Jumlah kendaraan roda dua di DIY

X_2 = Jumlah kendaraan roda empat di DIY

X_3 = Jumlah penerimaan investasi di DIY

X_4 = Jumlah angkatan kerja di DIY

X_5 = Jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY

b. Model yang digunakan:

$$Y = F(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$$

Secara spesifik modelnya adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

Hasil estimasinya adalah sebagai berikut :

$$Y = -99369750 + 9.3354322X_1 + 44.37446616X_2 + 0.0299517X_3 + 94.142851X_4 + 82.415607X_5$$

e. Kesimpulan

Bahwa secara bersama-sama maupun secara individu variabel-variabel jumlah kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat, jumlah angkatan kerja, jumlah penerimaan investasi dan jumlah wisatawan, memberikan pengaruh nyata dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian 99% dari variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen.

3 Penelitian selanjutnya adalah menganalisa Disparitas Alokasi Investasi Regional di Indonesia yang dilakukan oleh Bayu Wijayanto mahasiswa Pasca Sarjana UGM (studi Cross-Section pada tahun 1996) dengan menggunakan model OLS.

a. Variabel yang digunakan adalah:

Inv^1_j = Penanaman modal swasta baik PMA maupun PMDN di propinsi j
pada tahun (t) 1996

tab^1_j = Jumlah nilai simpanan masyarakat di lembaga perbankan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing di propinsi j pada tahun 1996.

cor^1_j = Rasio output capital di propinsi j pada tahun 1996

b. Hasil estimasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Hasil estimasi Disparitas Alokasi Investasi Regional di Indonesia

Variabel bebas	Nilai
Konstanta	2,55
	(6,08)
Log tab	0,72

	(11,44)
Log cor	1,16
	(11,66)
R ²	0,93
Adjust R ²	0,92
F Stat	171,36
DW Stat	2,30
χ^2	8,10

c. Kesimpulan

Dari hasil estimasi tampak bahwa model yang digunakan mampu menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen melalui variabel-variabel yang dipilih. Hal ini diperlihatkan melalui F statistik yang signifikan (signifikan pada α kurang dari 0,0005) dan nilai Adjusted R² = 92%. Nilai t-test dari masing-masing variabel dependen menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu mempengaruhi secara signifikan perilaku variabel dependen. Artinya hipotesis bahwa tingkat tabungan dan rasio output capital merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi investasi regional di Indonesia dapat diterima.

- 4 Penelitian selanjutnya adalah menganalisa tentang Tingkat Fiskal Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Dati II Bantul tahun 1979-1993 oleh Sri Kurniawati (1996) salah satu mahasiswa ekonomi UII.

a. Variabel yang digunakan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X_1 = Produk Domestik Regional Bruto

X_2 = Jumlah Penduduk

X_3 = Investasi

b. Model yang digunakan adalah

$$Y = b_0 + X_1b_1 + X_2b_2 + X_3b_3 + \dots + u_i$$

c. Hasil regresinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Hasil Estimasi Tingkat Fiskal Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Variabel penjelas	Nilai koefisien	Standar Error	T-stat
Lx1	6,3207954	0,7317683	8,6377007
Lx2	-17,058409	4,5112459	-3,781307
Lx3	0,2549144	0,1147914	2,2206760

$$R^2 = 0,991390$$

$$\text{Adj } R^2 = 0,989042$$

$$\text{DW} = 1,7799723$$

$$\text{F stat} = 422,2000$$

d. Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan bahwa dari penelitian tersebut bahwa terdapat hubungan antara faktor PAD dengan PDRB, jumlah penduduk dan investasi merupakan hubungan yang signifikan. Variabel yang dianggap berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan alat analisis regresi non linier berganda dapat dilihat besarnya

R^2 . Nilai R^2 yang diperoleh adalah 0,991 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 99% dari variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen. Untuk uji F hitung sebesar 422,2000 yang ternyata lebih besar dari F tabel menunjukkan secara bersama-sama PAD dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk, dan investasi yang berada di Dati II Bantul.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Tingkat Fiskal Daerah

Tingkat fiskal daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan untuk digunakan dalam membiayai pembangunannya. Posisi fiskal daerah kuat apabila kapasitas pajak lebih tinggi dari pada kebutuhan fiskal, disebut lemah apabila kebutuhan fiskal lebih tinggi dari pada kapasitas fiskal.

Posisi fiskal daerah dapat dihitung yaitu dengan menghitung upaya pengumpulan PADS dan elastisitas PADS terhadap PDRB. Upaya pengumpulan PADS merupakan rasio antara besarnya PADS terhadap kapasitas PADS. Oleh karena PADS terdiri dari pajak dengan bukan pajak, maka sulit untuk menentukan basis dari tarif PADS, untuk mengatasi kesulitan tersebut digunakan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto.

Semakin tinggi upaya pengumpulan PADS salah satu daerah (UPADS) menunjukkan posisi PADS daerah tersebut semakin kuat, dalam arti kapasitas atau kemampuan daerah untuk memperoleh pendapatannya semakin besar. Sebaliknya semakin rendah upaya pengumpulan PADS berarti posisi PADS daerah tersebut lemah.

Perimbangan keuangan Pusat – Daerah menjadi masalah yang krusial dalam hubungan antara keuangan Pusat – Daerah. Istilah Otonomi dalam pembangunan daerah secara tidak langsung mensyaratkan perlunya kemandirian

bagi daerah dalam melaksanakan program-programnya. Idealnya pola pembiayaan terhadap wewenang yang dilimpahkan Pusat kepada Daerah, sebagian besar harus diperoleh dari PAD. Namun kenyataannya Pusat masih terlalu kuat bagi daerah. Salah satu bentuknya adalah dengan pemberian sumber dana yang berkaitan dengan wewenang yang diberikan. Ini menunjukkan adanya kontradiksi antara prinsip yang harus diterapkan dengan implementasi kebijakan oleh aparat pemerintah. Kontradiksi ini secara nyata juga terlihat dari aspek keuangan sehingga Pemda kehilangan keleluasaan bertindak untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam proses pembangunan ekonomi di daerah masing-masing (Jaka Sriyana 1999).

3.2. Pokok-pokok Kebijaksanaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keuangan negara (Government Finance), dapat diartikan sebagai gambaran segala kegiatan pemerintah didalam mencari sumber-sumber dana dan kemudian mengatur penggunaan dana-dana tersebut sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam perkembangannya keuangan negara tidak lagi hanya menggambarkan kegiatan pemerintah saja namun menggambarkan pula penyediaan kebutuhan atau hajat hidup orang banyak seperti jasa pelayanan kereta api, telepon, listrik, air bersih dan sebagainya.

Keuangan negara tidak hanya mencakup pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan tetapi juga keuangan daerah,

dalam hal ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta Badan Usaha Milik daerah (BUMD).

Ruang lingkup keuangan negara pada prinsipnya mencakup kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara, dengan pajak-pajak sebagai sumber penerimaan utama.
- b. Pengelolaan pinjaman negara dengan pelunasannya.
- c. Pengelolaan keuangan negara
- d. Penatausahaan keuangan negara
- e. Pengelolaan dan perumusan kebijaksanaan fiskal yang pada prinsipnya mengembangkan keuangan negara atas pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga, dan juga efisiensi alokasi sumber-sumber dana.
- f. Pengelolaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran tentang pentingnya peranan tersebut pada dasarnya menunjukkan fungsi-fungsi utama pemerintah yang harus dilaksanakan dalam sebuah proses pembangunan terutama dalam hal anggaran belanja.

R.A. Musgrave (1959 : 5-27) membedakan tiga fungsi dan tujuan kebijaksanaan pemerintah dalam hal anggaran belanja. Ketiga fungsi itu adalah :

- a. Fungsi Alokasi (Allocatoin Branch)

Merupakan fungsi untuk menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan publik atau publik wants.

b. Fungsi Distribusi (Distribution Branch)

Merupakan fungsi yang dilandasi dengan pertimbangan pengaruh sosial ekonomi. Pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar, macam-macam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas cabang distribusi tersebut.

c. Fungsi Stabilisasi (Stabilization Branch)

Fungsi ini menyangkut usaha untuk mempertahankan tingkat penggunaan faktor-faktor produksi yang tinggi dan meningkatkan stabilitas ekonomi dengan mengurangi tingkat pengangguran, inflasi dan kestabilan nilai uang.

Ketiga fungsi utama pemerintah tersebut di Indonesia telah tercakup dalam Trilogi Pembangunan. Sebagai sumber dasar dari fungsi atau tugas pemerintah di Indonesia tercermin dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan tugas tersebut meliputi .

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembiayaan kegiatan pemerintah, baik yang menyangkut operasional maupun pembangunan harus didasarkan kepada azas pembiayaan sebagai berikut :

a. Azas Desentralisasi

Azas ini menekankan agar urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dibiayai atas beban APBD.

b. Azas Tugas Pembantuan

Azas ini menekankan agar urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang lebih rendah tingkatnya dibiayai atas beban anggaran pemerintah yang menugaskan.

c. Azas Dekonsentrasi

Azas ini menekankan agar urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat dibiayai atas beban APBN.

Di Indonesia, azas sentralisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 8 yang menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan Undang-undang, dan menimbang dan mengingat dasar musyawarah negara dan hak asal usul daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 8 UUD 1945 tersebut dikeluarkanlah Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah antara lain, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 22 tahun dan Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

3.3. Tolak Ukur Pendapatan Asli Daerah

Untuk menilai keberadaan Pendapatan Asli Daerah, secara khusus belum ada. Untuk menilai Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui jalur dari pos-pos penerimaan yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Acuan yang dipakai untuk menilai Pendapatan Asli Daerah dicerminkan dari pos penerimaan retribusi daerah.

Kriteria-kriteria penilaiannya adalah :

1. Kecukupan (Elastisitas)

Suatu penerimaan daerah khususnya retribusi daerah, memadai tidaknya suatu hasil retribusi daerah yang didapat dari berbagai layanan yang diberikan, stabilitas dan mudahnya ,memperkirakan hasil yang didapat.

2. Keadilan

Dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah harus bersifat adil, artinya harus jelas dasarnya dan kewajibannya.

3.4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada kepala daerah dalam merencanakan, menggali, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, maka Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat dan juga menunjukkan besarnya pengendalian pusat terhadap seluruh kegiatan administrasi, penyelenggaraan, pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah diberi wewenang untuk semakin

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dinas, penerimaan lain-lain, laba perusahaan daerah.

Untuk mengembangkan sumber dana potensi Pendapatan Asli Daerah sering mengalami kendala, hal ini karena pengenaan dan penarikan Pendapatan Asli Daerah harus memperhatikan tolak ukur seperti hasil, keadilan, efisiensi, kemampuan dan kecocokan obyek sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sehingga peranan manajer keuangan pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama dalam memanfaatkan informasi dan tolak ukur untuk menentukan langkah bagi usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam batas-batas yang diijinkan mapatda (Insukindro, 1994, hal 2).

Sedangkan untuk mengukur hasil pengupayaan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan cara seperti efisiensi dan efektifitas (Nick Devas Keuangan Pemerintah Dearah, IV 1996).

1. Hasil Guna (Efektifitas)

Pajak atau retribusi besarnya mengukur hubungan antara hasil pajak atau retribusi terhadap poitensi pajak atau retribusi membayar pajak dan retribusi dan seluruh tunggakan pajak atau retribusi terhutang mereka.

2. Daya Guna (Efisiensi)

Besaran ini mengukur bagian dari pajak atau retribusi yang digunakan untuk menutup biaya (biaya marjinal) memungut pajak atau retribusi yang bersangkutan, daya guna akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan ditekan serendah mungkin.

Untuk mencapai target dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan langkah-langkah atau usaha-usaha antara lain dengan melakukan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. Baik melalui perubahan tarif maupun melalui penghapusan pajak daerah yang tidak memberikan hasil yang tidak memuaskan.

Sedangkan pajak-pajak yang cukup berperan terhadap penerimaan daerah dipertahankan kemudian diperbaiki. Hal ini akan lebih mengimbangi hasil yang hilang karena penghapusan pajak yang lain. Besar kecilnya tarif pajak dan retribusi juga dipandang sebagai faktor lain yang menyebabkan berhasilnya usaha meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Intensifikasi adalah usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menciptakan jenis pajak atau retribusi baru yang mungkin sesuai dengan peraturan. Disamping itu pengawasan, juga dianggap penting, karena pengawas yang baik mungkin sekali terjadi kegagalan dan kebocoran dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah.

3.5. Kemampuan Politik

Ditinjau dari sumber-sumber penerimaan, Pendapatan Asli Daerah sumbernya murni dari daerah.

Dengan demikian secara langsung dan tidak langsung sumber penerimaan berasal dari masyarakat, sehingga sasaran dibidang politik yaitu terciptanya tatanan kehidupan politik yang konstitusional berdasarkan Demokrasi Pancasila yang

mantap dan dinamis dengan kualitas manusia dan masyarakat yang memiliki kesadaran serta berperilaku sesuai budaya politik Pancasila dalam semangat kesatuan bangsa dengan terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dapat tercapai.

3.6. Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah pada dasarnya dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan non pajak, penerimaan non pajak misalnya penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang dan sebagainya.

Penerimaan lainnya adalah dari pajak, definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut berdasarkan Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

3.7. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang RI No. 22 Tahun 1992 sumber Pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pendapatan daerah yang secara

bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bila laju pertumbuhan PAD lebih cepat dari laju pertumbuhan APBD, maka hal itu menunjukkan bahwa usaha pemerintah daerah dalam menggali penerimaan daerah sudah cukup baik dalam hal itu telah menunjukkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya. Sedangkan bila laju pertumbuhan APBD lebih cepat dari pertumbuhan PAD maka hal itu menunjukkan bahwa dalam hal pembiayaan pembangunan daerah peran sumbangan dari pemerintah pusat semakin lancar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan keuangan daerah yang diperoleh daerah, yang diperoleh dari :

1. Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi Daerah disamping Retribusi Daerah, pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya sebagai berikut :

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tagen prestatie*) untuk membiayai pengeluaran umum (*publike uitgaven*), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.

Pendapat ini kemudian disempurnakan kembali oleh ahli yang sama sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Dari pendapat tersebut diatas terlihat bahwa ciri mendasar pajak adalah :

- a. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan / atau peraturan hukum lainnya.
- b. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran Negara dan sisanya apabila masiha ada digunakan untuk investasi.
- d. Pajak disamping sebagai sumber keuangan Negara (budgetair) juga berfungsi sebagai pengatur (regulair).

Sedangkan mengenai pengertian pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli sebagi berikut :

Rochmad Sumitro merumuskan pajak daerah sebagai berikut :

Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Propinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya.

Sedangkan Siagian merumuskannya sebagai, ” Pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan / atau peraturan hukum lainnya.
- c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
- d. Penyerahannya berdasarkan Undang-Undang

Landasan hukum pemungutan pajak oleh pemerintah daerah diatur dalam pasal 58 Undang-undang No. 5 tahun 1974 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Dengan undang-undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah.
2. Dengan peraturan daerah ditetapkan pungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini , berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan tidak boleh berlaku surut.
4. Pengembalian atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan daerah.

Yang dimaksud dengan pajak daerah menurut UU No. 11 tahun 1957 pasal 2 adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pungutan pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Atau dengan kata lain merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pemungutan sehubungan dengan pemakaian fasilitas dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah misalnya, pemakaian tempat parkir, pemakaian fasilitas pasar dan sebagainya.

Ada beberapa sifat retribusi daerah, diantaranya yaitu (R. Soedargo 1974 : 45) :

1. Pelaksanaannya bersifat ekonomis
2. Ada imbalan langsung kepada pembayar
3. Walaupun memenuhi persyaratan formal dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau atau tidak mau untuk membayar
4. Merupakan pemungutan yang pada umumnya sifat budgetnya tidak menonjol
5. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu kebutuhan dengan memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Berdasarkan pengertian retribusi daerah, terlihat adanya perbedaan dengan pajak daerah, pada retribusi daerah pembayarannya oleh seseorang akan diikuti dengan diterimanya jasa atau fasilitas dari daerah. Sedangkan pada pajak daerah dimana setiap pembayar pajak tidak mendapat manfaat langsung dari daerah.

3 Hasil Perusahaan Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah perusahaan daerah. Dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegangan pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.

Dalam penjelasan umum UU No. 5/ 1974, pengertian Perusahaan daerah dirumuskan sebagai “ Suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah”. Dari kutipan diatas tergambar dua fungsi pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan / stimulan bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah. Ini berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah.

Pasal 5 UU No. 5 / 1962 menegaskan sifat perusahaan daerah sebagai berikut :

1. Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :
 - a. Memberi jasa

- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum
 - c. Memupuk pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan diatas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain , perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan lemahnya peranan Perusahaan Daerah dalam menopang Pendapatan daerah yakni :

1. Berkaitan dengan pengelolaan perusahaan itu sendiri yang membutuhkan profesionalisme tersendiri dimana tenaga-tenaga untuk itu sangat terbatas dimiliki daerah-daerah.
2. Organisasi pengelolaannya kurang baik, dalam hal ini perusahaan-perusahaan daerah yang ada tidak memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi yang diperlukan oleh organisasi bisnis umumnya.

3. Kurangnya fasilitas atau alat yang dimiliki oleh daerah dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan-perusahaan yang dimilikinya.

4. Penerimaan dari Dinas-dinas

Penerimaan dari dinas-dinas merupakan penerimaan yang diterima karena adanya, proyek-proyek pemerintah yang diserahkan kepada dinas-dinas pemerintah. Penerimaan ini timbul karena pelayanan yang diberikan oleh dinas pemerintah kepada masyarakat. Dinas-dinas yang ditunjuk akan menjalankan proyek-proyek pemerintah dengan anggaran yang ada, dan dari kegiatan yang ada, dan dari kegiatan proyek tersebut akan memberikan hasil yang kemudian akan menjadi penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 49 UU No.5 tahun 1974 mengatur tentang dinas-dinas daerah sebagai berikut:

1. Dinas daerah adalah untuk pelaksanaan pemerintah daerah
2. Pembentukan susunan organisasi atau formasi dinas daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh MENDAGRI.

Dinas-dinas yang termasuk disini adalah dinas pariwisata, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pertanian, dinas perikanan dan dinas lainnya yang dikelola oleh suatu daerah.

5. Penerimaan lain-lain yang sah

Penerimaan lain-lain ini merupakan hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha Perangkat Pemerintah daerah bukan merupakan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat daerah yang lebih tinggi.

Penerimaan ini adalah hasil penerimaan daerah yang diperoleh dari penerimaan diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan penerimaan dinas-dinas, lain-lain yang sah ini disatu pihak lebih mengarah pada publik service dan bersifat penyuluhan.

Penerimaan lain-lain yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang sah (yaitu peraturan daerah) yang diperoleh dari penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda dua, roda empat, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro (kas daerah), biaya pembinaan, dan penyewaan tempat, pedagang ikan, setoran cicilan utang, setoran pembinaan lembaga keuangan desa dan lain-lain.

3.8. Penerimaan Daerah sebagai Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut John Maynard Keynes investasi adalah penambahan atas persediaan benda-benda modal yang ada. Dengan kata lain investasi mencakup kegiatan penanaman modal baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam usaha-usaha yang bersifat produktif dengan tujuan akan memperoleh keuntungan dari investasi yang ditanamkan.

Investasi yang dilakukan pemerintah pada dasarnya akan dibiayai melalui sumber-sumber yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kenaikan investasi pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Karena pendapatan meningkat maka permintaan akan barang konsumsi menjadi naik, pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan. Proses ini akan berlangsung secara kumulatif.

3.8.1. Jenis-jenis investasi

Menurut Sadono Sukirno (1985 : 117) investasi yaitu penanaman modal dalam perekonomian menurut jenisnya dibedakan menjadi dua bagian :

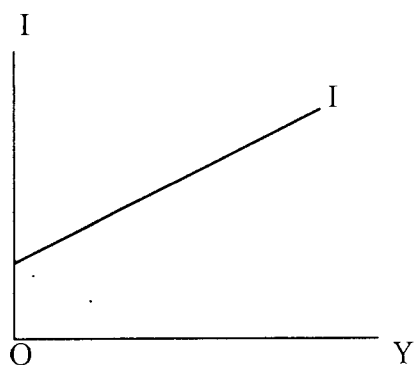
- a. *Induced Investment* yaitu investasi yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan-perubahan pendapatan, semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi investasi dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatan semakin rendah tingkat investasi yang terjadi. Investasi ini juga terjadi karena adanya pertambahan permintaan efektif yang mula-mula ditujukan kepada hasil-hasil permintaan akan barang-barang modal sehingga mendorong naiknya investasi.
- b. *Autonomous Investment* yaitu investasi yang tidak terpengaruh oleh perubahan pendapatan, investasi ini ditentukan oleh perkembangan dalam jangka panjang, terutama oleh penemuan kekayaan alam yang baru dan kemajuan teknologi.

Berarti investasi ini adalah investasi untuk menciptakan perubahan-perubahan segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Investasi ini pada

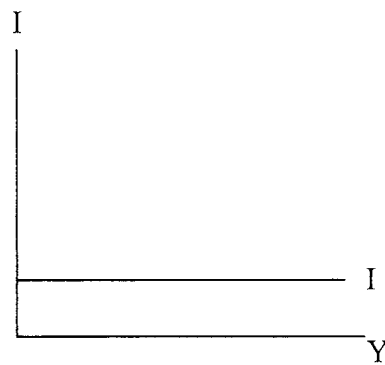
umumnya dilakukan oleh golongan enterpreneur atau wiraswasta yang bersifat agresif dalam percobaan-percobaan dan ingin atau tertarik pada kemungkinan-kemungkinan untuk dapat dipraktekkan.

Dari investasi tersebut, induced invesment atau investasi terpengaruh adalah yang paling besar jumlahnya. Perbedaan kedua jenis investasi ini terlihat pada gambar I.

Gambar I



(a) Investasi Terpengaruh



(b) Investasi Autonomi

Sumber : Sadono Sukirno, 1985 : 115

Keterangan I = Investasi

Y = Pendapatan

Gambar I (a) menunjukkan semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula tingkat investasi. Sedangkan gambar I (b) merupakan fungsi investasi autonomi berbentuk garis datar dengan pendapatan, berarti tingkat investasi selalu sama besarnya pada berbagai tingkat pendapatan.

Secara makro, dalam analisis sederhana tentang pendapatan nasional (Y), pengeluaran, masyarakat seluruhnya pada setiap satuan waktu akan terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) dan pengeluaran investasi (I) sehingga $Y = C + I$. Dengan persamaan $Y = C + I$ maka perhitungan pendapatan nasional ekuilibrium adalah :

$$Y = C + I$$

$$C = a + cY, \text{ maka}$$

$$Y = a + cY + I$$

$$Y - cY = a + I$$

$$(1 - c)Y = a + I$$

$$Y = \frac{I}{1 - c} (a + I)$$

Hubungan antara perubahan investasi dan perubahan pendapatan nasional ekuilibrium yang diakibatkan oleh perubahan investasi tersebut diterangkan oleh angka pengganda (multiplier). Angka pengganda adalah bilangan dimana investasi harus dikalikan apabila kita ingin mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional yang diakibatkan oleh perubahan investasi tersebut.

3.8.2. Peranan Investasi

Menurut Harrod- Domar pengeluaran investasi tidak hanya mempunyai pengaruh lewat proses multiplier terhadap permintaan agregat (AD), tetapi juga terhadap penawaran agregat (AS) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang investasi menambah stok

kapital seperti : pabrik-pabrik, jalan-jalan, dan sebagainya. Ini berarti juga peningkatan kapasitas produksi masyarakat selanjutnya berarti akan menggeser kurva penawaran agregat (AS) kekanan. Setiap penambahan stok kapital masyarakat untuk meningkatkan output atau pendapatan.

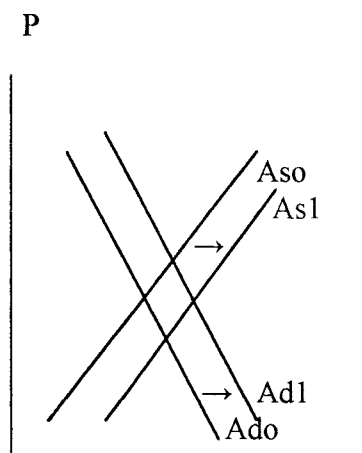
Output yang potensial tersebut dapat dihasilkan dengan stok kapital yang ada, bila output realisasi atau yang diproduksi sama dengan output yang potensial berarti seluruh kapasitas investasi terpakai secara penuh. Karena output potensial juga merupakan tingkat output maksimum bila dilihat dari segi stok kapital masyarakat yang tersedia.

Harrod- Domar menggambarkan hubungan yang sederhana antara investasi dan pendapatan (output potensial) sebagai :

$$Y = h I$$

Dimana h menunjukkan berapa unit output yang bisa dihasilkan dari setiap unit investasi dan kebalikkannya yaitu $1/h$ adalah Capital Output Ratio karena hubungan proporsional maka $I/Y = \Delta I / \Delta Y$ adalah ICOR

Gambar 2. Pengaruh investasi terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat



Sumber : Boediono, 1981 : 59

Keterangan :

P = Harga

Q = Output

A = ΔI menggeser AD lewat proses multiplier (jangka pendek)

B = ΔI menggeser AS lewat penambahan kapasitas produksi
(Jangka panjang)

AD = Permintaan agergat

AS = Penawaran agregat

3.9. Pengaruh masing-masing variabel terhadap Pendapatan

3.9.1. Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranannya ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Yang pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja. Yang kedua, penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir penambahan produksi nasional dan

kesempatan kerja. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan ini akan memberi sumbangan penting keatas kenaikan produktifitas dan pendapatan perkapita masyarakat.(Todaro, 1998, hal 124)

3.9.2. Pengaruh jumlah Angkatan kerja dengan Pendapatan

Pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif (Todaro, 1999 :125). Terciptanya lebih banyak kesempatan kerja berarti tersedianya lebih banyak sumber-sumber pendapatan potensial bagi kalangan penduduk. Kenaikan pendapatan bagi tenaga kerja pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang secara tidak langsung akan membantu menaikkan pendapatan nasional.

3.9.3. Pengaruh jumlah Penduduk terhadap Pendapatan

Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Pertambahan penduduk bukanlah suatu masalah, melainkan sebaliknya justru merupakan unsur penting yang akan memacu pembangunan ekonomi. Populasi yang lebih besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi produksi yang menguntungkan semua pihak,

menurunkan biaya-biaya produksi, dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang tingkat output atau produksi agerpat yang tinggi (Todaro, 1997, hal 104).

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

4.1. Sejarah

Yogyakarta merupakan suatu kesultanan yang juga mencakup kadipaten Pakualaman. Dimasa Hindia Belanda wilayah ini disebut *Zelfbesturende Landscape*. Dimasa kemerdekaan dikenal dengan nama Daerah Swapraja. Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat berdiri sejak tahun 1756 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwono I). Kadipaten Pakualaman berdiri sejak tahun 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengkubuwono II) yang kemudian bergelar Adipati Pakualam I.

Baik kesultanan maupun Pakualaman, diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri. Kontrak politik terakhir Kesultanan tercantum dalam *Staatblad* 1941 No. 47, dan untuk Pakualaman dalam *Staatblad* 1941 No. 577.

Tatkala kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia. Kedua daerah tersebut kemudian bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Kepala Daerah dan Pakualam VIII sebagai wakil Kepala Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

5.2. Keadaan Geografi

Luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.1855,81 Km². Secara geografi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak ditengah-tengah pulau jawa belahan selatan yang dilihat dari aspek kelautan sangat strategis karena berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Propinsi ini terletak antara 7°30 dan 8°15 Lintang Selatan dan 100°00-110°52 Bujur Timur. Administrasi pemerintahan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi dalam lima daerah tingkat II (satu kotamadya dan 4 kabupaten) 73 kecamatan, 393 desa dan 45 kelurahan.

- Kotamadya Yogyakarta mempunyai luas wilayah : 32,50 Km
- Kabupaten Bantul mempunyai luas wilayah : 506,85 Km²
- Kabupaten Kulon Progo mempunyai luas wilayah : 586,26 Km²
- Kabupaten Gunung Kidul mempunyai luas wilayah : 1.485,36 Km²
- Kabupaten Sleman mempunyai luas wilayah : 574,82 Km²

Adapun batas-batas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah selatan dibatasi oleh lautan Indonesia yang membentang luas, bagian timur laut, barat laut, dan barat dibatasi oleh wilayah propinsi jawa tengah yang meliputi :

- Bagian Tenggara adalah kabupaten Wonogiri
- Bagian Timur adalah kabupaten Klaten
- Bagian Barat Laut adalah kabupaten Magelang
- Bagian Barat adalah kabupaten Purworejo

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai topografi yang berbeda-beda dari datar sampai yang bergunung-gunung dengan kemiringan lahan atau

lereng dari 2 persen sampai lebih dari 40 persen atau 3-8 derajat sampai lebih dari 25 persen. Sedangkan ketinggian tempatnya bervariasi antara 0 sampai di atas 1000 M dari permukaan air laut yang persebarannya adalah sebagai berikut :

- 0-1000 M di sebagian besar kabupaten Bantul dan sebagian kabupaten Sleman, kecuali kabupaten Bantul bagian selatan yang merupakan dataran Aluvial yang berasal dari Gunung Merapi.
- Kawasan yang memiliki ketinggian 1000 M atau lebih hanyalah di kabupaten Sleman, yaitu pada kawasan Gunung Merapi.

4.3. Iklim

Kabupaten Sleman, kabupaten Kulon Progo, dan kodya Yogyakarta mempunyai iklim bulan basah dengan bulan kering 4-6 bulan.

Curah hujan di daerah Yogyakarta bervariasi antara 1000-1500 mm pertahun sampai sekitar 1500-2000 mm pertahun yang penyebarannya di seluruh propinsi kecuali Gunung Kidul.

4.4 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2000 berjumlah 3.102.5 ribu jiwa atau naik sebanyak 2,64 % dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata adalah sebesar 0,51 % pertahun selama periode 1990-1999. Bila dibandingkan propinsi-propinsi di pulau Jawa dan Bali, maupun rata-rata Indonesia, laju pertumbuhan penduduk propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menunjukkan angka terendah. Rendahnya tingkat pertumbuhan tersebut berkaitan

dengan keberhasilan program Keluarga Berencana di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.1 Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun menurut propinsi di Pulau Jawa dan Bali, 1971-1999.

Propinsi	1971-1980	1980-1990	1990-1999
DKI Jakarta	3.93	2.42	1.67
Jawa Barat	2.66	2.57	1.99
Jawa Tengah	1.64	1.18	0.94
D I Yogyakarta	109	0.57	0.51
Jawa Timur	1.49	1.08	0.87
Bali	1.69	1.18	1.04
Indonesia	2.32	1.98	1.61

Sumber : Inkesra 1999, BPS Jakarta

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antara kabupaten dan kotamadya. Oleh karena itu diharapkan adanya persebaran penduduk yang lebih merata dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya atau rendah tingkat kepadatannya.

Penduduk propinsi Dearah Istimewa Yogyakarta sebagian besar tinggal di kabupaten Sleman, tetapi bila dilihat menurut tingkat kepadatannya, angka tertinggi tercatat di kodya Yogyakarta, kemudian kabupaten sleman yang masing-masing besarnya 12.200 jiwa per Km² dan 1.568 per Km² pada tahun 2000 dan di kabupaten Gunung Kidul tingkat kepadatannya hanya 451 jiwa per Km².

Tabel 4.2. Kepadatan Penduduk di propinsi DIY, 1990-2000

KAB / KOTA	KEPADATAN PENDUDUK / Km ²		
	1990	1999	2000
Kulon Progo	635	610	633
Bantul	1.357	1.458	1.541
Gunung Kidul	438	425	451
Sleman	1.358	1.493	1.568
Yogyakarta	12.679	13.467	12.206

Sumber : Susenas 1990, Sp 1999, Sp 2000

Keberhasilan pembangunan dibidang kependudukan antara lain dapat dilihat melalui perubahan komposisi penduduk menurut umur yang digambarkan dengan semakin rendahnya proporsi penduduk yang tidak produktif (penduduk berumur muda dan lanjut usia). Selanjutnya akan berpengaruh pada rendahnya angka beban ketergantungan.

Tabel 4.3. Komposisi penduduk dan angka beban tanggungan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1998-2000.

Tahun	Umur			Jumlah Total	Angka Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+		
1998	22.79	67.44	9.7	100.00	52
1999	22.68	68.28	9.06	100.00	48
2000	20.87	68.47	10.66	100.00	46

Sumber :Sp 1998,1999,2000

4.5. Angkatan Kerja

Sasaran utama pembangunan dibidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja.

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) yang biasa disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Kesempatan kerja memberi gambaran berasrnya tingkat penyebaran tenaga kerja.

Tabel 4.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka di Propinsi DIY, 1998-2000.

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Angka Pengangguran Terbuka
1998	67,7	3,7
1999	69,6	3,7
2000	63,98	3,6

Sumber : Inkesra, 1998, 1999, BPS Jakarta, Susenas 2000

Pada tahun 2000 terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menjadi 63,98 yang diikuti dengan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dari 3,7 menjadi 3,6. Turunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja maupun pengangguran kemungkinan disebabkan karena dari sebagian dari angkatan kerja melanjutkan sekolah dan pekerja wanita yang berhenti bekerja karena mengurus rumah tangga.

4.6. Komposisi Angkatan Kerja

Pada tahun 1990 di Daerah Istimewa Yogyakarta penduduk yang tergolong usia kerja tercatat sebanyak 2,39 juta atau 82,3% dari jumlah penduduk, sedangkan menurut sensus penduduk 1990 sekitar 77,7%.

Dengan demikian terjadi kenaikan persentase penduduk usia kerja selama satu dasawarsa terakhir.

Jumlah angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1980 tercatat sebesar sekitar 1,2 juta dan pada tahun 1990 angka ini naik menjadi sekitar 1,5 juta berarti kenaikan sebesar hampir 22% (tabel 4.5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 1980 adalah 58,9%.

Sedangkan tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi 63,4% (tabel 4.5) lebih besar dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja nasional yang pada tahun 1980 hanya mencapai 54,7%.

Rata-rata laju pertumbuhan angkatan kerja selama kurun waktu 1980-1990 sebesar 2% per tahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk umur 10 tahun keatas sebesar 1,2 % pertahun.

Pertumbuhan angkatan kerja yang melebihi pertumbuhan jumlah penduduk umur 10 tahun keatas, disebabkan karena naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Karena naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, tingginya pertumbuhan angkatan kerja dan besarnya jumlah angkatan kerja yang dihadapkan pada kesempatan ekonomi yang belum memberikan kesempatan kerja yang memadai mengakibatkan bertambahnya penduduk yang bekerja disektor informasi.

Tabel 4.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jenis Kelamin	1980		1990	
	AK	TPAK	AK	TPAK
Perkotaan				
Laki-laki	121.603	50,67	324.004	60,82
Perempuan	83.418	34,57	253.000	46,11
Laki-laki+Perempuan	205.101	42,60	577.004	53,36
Pedesaan				
Laki-laki	569.410	72,71	499.024	78,25
Perempuan	472.919	55,67	455.419	65,58
Laki-laki+Perempuan	1.042.329	62,63	944.443	71,72
Perkotaan+Pedesaan				
Laki-laki	691.093	67,18	823.028	70,23
Perempuan	565.337	51,01	698.429	56,88
Laki-laki+Perempuan	1.247.430	58,68	1.521.447	63,44

4.7. Perkembangan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta

Laju pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator makro untuk melihat perkembangan suatu daerah. Perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi suatu daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur perekonomian daerah tersebut. Pada tahun 1997 perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta terpengaruh oleh merosotnya nilai rupiah terhadap US dollar yang mulai terjadi setelah pertengahan tahun.

Pada tahun 1998 kondisi perekonomian ternyata lebih buruk dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1997. Dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian

ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan angka negatif pada tahun 1998, yaitu sebesar $-11,8\%$. Sementara pada tahun 1997 laju pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan angka positif yaitu sebesar $3,51\%$. Jadi boleh dikatakan pada tahun 1998 perekonomian benar-benar terpuruk.

Pada tahun 1999 perekonomian nampaknya sudah mulai menunjukkan gejala kearah pemulihan ekonomi. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan angka positif. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi berhasil mencapai angka $1,99\%$ kemudian pada tahun 2000 perekonomian terlihat sedikit lebih membaik dengan angka pertumbuhan ekonomi mencapai $4,01\%$.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode 1993-1996 sebelum terjadi krisis ekonomi, terlihat cukup tinggi yaitu sebesar $7,90\%$ per tahun. Sedangkan pada periode 1996-2000, rata-rata pertumbuhan ekonomi masih memprihatinkan, yaitu hanya $-0,87\%$ per tahun.

Pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi secara sektoral menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor industri pengolahan dengan laju pertumbuhan $-2,69\%$ dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan laju pertumbuhan $-1,22\%$. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup mencolok karena pada tahun 1999, hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu $-5,50\%$.

Pada tahun 2000 sektor ekonomi lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi selain dua sektor diatas adalah sektor listrik, gas, air bersih. Tingkat pertumbuhan sektor ini mencapai $7,88\%$, sekaligus juga merupakan perubahan

tertinggi ketiga pada tahun 2000. Tingginya pertumbuhan sektor ini utamanya disebabkan dari tingginya peningkatan sub sektor listrik yang mencapai 8,16%. Sementara itu, sub sektor air bersih pada tahun 2000 ini juga tumbuh sebesar 5,29%.

Sektor-sektor ekonomi selain tiga sektor yang telah disebutkan diatas, semuanya mengalami pertumbuhan dibawah 5%. Bahkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor industri pengolahan justru mengalami penurunan seperti telah disebutkan diatas.

Sektor-sektor yang dimaksud terakhir yang boleh dikatakan masih tumbuh dengan konsisten sampai dengan tahun 2000 adalah sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran masing-masing sebesar 4,59% dan 4,02%. Sementara itu, sektor jasa-jasa masih tumbuh sebesar 2,67%, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian hanya 0,13%.

4.8. Perkembangan PDRB Perkapita

PDRB Perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dengan membagi nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada diwilayah tersebut dengan jumlah penduduk.

Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB Perkapita, sedangkan besar kecilnya PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat didaerah tersebut.

Pada tahun 1997 PDRB Perkapita DIY hanya Rp 2,37 juta selanjutnya pada tahun 1999 PDRB Perkapita meningkat menjadi Rp \$,15 juta , akan tetapi berdasarkan harga konstan 1993, PDRB Perkapita DIY tahun 1997 tercatat sebesar Rp 1,76 juta dan pada tahun 1998 PDRB Perkapita mengalami penurunan 11,93% menjadi Rp 1,55 juta. Pada tahun 1999 PDRB Perkapita DIY mengalami kenaikan menjadi Rp 1,56 juta. Sedangkan pada tahun 2000 PDRB Perkapita DIY atas dasar harga konstan 1993 tercatat sebesar Rp 1,61 juta hal ini berarti menunjukkan peningkatan sebesar 3,21% jika dibandingkan dengan tahun 1999.

4.9. Perkembangan SP PMA / PMDN Menurut Lokasi DATI II

Perkembangan penanaman modal PMA / PMDN yang disetujui di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Perkembangan Penanaman Modal PMA/PMDN
Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Selama Pelita VI 1994/1995-1998-1999

Tahun	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Nilai Investasi (Rp Jt)	Jml Proyek	Nilai Investasi (US \$)
1994/1995	21	400.350.184	2	750.000
1995/1996	31	185.640.078	12	95.146.273
1996/1997	13	41.568.000	5	43.137.134
1997/1998	3	203.819.000	1	2.000.000
1998/1999	-	-	-	-
Jumlah	68	831.377.252	20	141.003.407

Sumber : BKPM, DIY

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan penanaman modal PMA/PMDN di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama pelita VI mengalami kenaikan. Pada awal pelita VI atau tahun anggaran 1994/1995 menunjukkan adanya kecenderungan bahwa iklim usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin baik.

Hal ini terlihat dari jumlah dan nilai investasi cukup besar, yaitu sebesar Rp 400,3 Milyar dan US\$. 750.000 dengan jumlah proyek 23. Dari 23 proyek tersebut 2 diantaranya adalah menggunakan fasilitas PMA. Sedangkan dalam tahun anggaran 1995/1996 jumlah investasinya sebesar Rp. 185,640 milyar dan US\$. 95.146.273 dengan jumlah proyek 43. Dari 43 proyek tersebut 12 diantaranya menggunakan fasilitas PMA. Disini dapat dilihat bahwa jumlah proyek PMA semakin meningkat.

Untuk tahun 1996/1997, baik jumlah proyek investasi maupun jumlah proyek mengalami penurunan sedikit, namun dilihat dari total selama pelita VI (hingga bulan juni 1997 maka untuk PMDN urutan pertama (1) adalah Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp 330.790.942 juta, sedangkan urutan kedua (2) adalah kodya Yogyakarta Rp. 199.593.023 juta, urutan ketiga (3) adalah kabupaten Gunung Kidul Rp. 53.178.083 juta.

Untuk PMA urutan satu adalah kodya Yogyakarta US\$. 78.008.273 diikuti loeh kabupaten Sleman sebesar US\$. 46.587.134.

Namun secara keseluruhan selama pelita V dan pelita VI urutan satu tetap diduduki oleh kabupaten Sleman kemudian kodya Yogyakarta.

Tabel 4.7
 Penanaman Modal PMA/PMDN Berdasarkan Lokasi Tingkat II
 Selama Pelita VI

NO	KAB/KOTA	JUMLAH INVESTASI	
		PMDN (Rp Jt)	PMA (US \$)
1	Kab. Sleman	330.790.942.000	46.587.134
2	Kota. Yogyakarta	199.593.023.000	78.008.273
3	Kab. Bantul	45.820.000.000	16.438.000
4	Kab. Gunung Kidul	53.178.080.000	-
5	Kab. Kulon Progo	210.994.217.000	-
	Jumlah	831.377.262.000	141.003.407

Sumber : BKPM, DIY

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Data dan Sumber Data

5.1.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah Investasi, Angkatan kerja, dan jumlah Penduduk, masa observasi dari tahun 1985-2000.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dan wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diukur dengan satuan uang.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang diukur dengan satuan orang.

Investasi adalah penambahan atas persediaan benda-benda modal yang ada. Dengan kata lain investasi mencakup kegiatan penanaman modal baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam usaha-usaha yang bersifat produktif dengan tujuan memperoleh laba dari investasi yang ditanamkan, yang diukur dengan satuan rupiah.

Penduduk adalah orang yang tinggal dalam suatu negara minimal dalam waktu lima tahun dan mempunyai keinginan untuk menetap. Dalam hal ini diukur dengan satuan orang.

5.1.2. Sumber Data

Data Pendapatan Asli daerah (PAD) diperoleh dari Yogyakarta Dalam Angka, Biro Pusat Statistik. Data Investasi diperoleh dari laporan Tahunan BKPMY Yogyakarta, data Angkatan Kerja diperoleh dari Statistik Indonesia, dan data Penduduk berasal dari Statistik Indonesia.

5.2. Analisis Hasil Regresi

Hasil regresi meliputi penyajian hasil regresi, pengujian hasil hubungan antara variabel terikat (dependent variable), dengan variabel penjelas (explanatory variable).

Secara statistik prosedur analisis yang dilakukan meliputi variabel-variabel penjelas secara serentak dan parsial serta pengujian asumsi klasik.

5.2.1. Hasil Regresi

Dalam analisis ini variabel independen dan variabel dependen diestimasi dengan menggunakan model dinamis yaitu Partial Adjustment Model (PAM) dengan menggunakan model micro TSP yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1

Variable	Coefficient	Standar Error	T-Hitung
Konstanta	-105.40203	80.169936	-1.3147343
LNX1	0.1278007	0.0385805	3.3125738
LNX2	-5.2488912	2.0768413	-2.5273435
LNX3	12.680839	6.9178811	1.83300525
LN _Y (-1)	0.3184396	0.3365606	0.9461585

R- Squared = 0.957078

Adj R- Squared = 0.939909

F-Statistik = 55.74537

Keterangan :

N = 16

LNX₁ = Jumlah Investasi Dalam Negeri

LNX₂ = Jumlah Angkatan Kerja

LNX₃ = Penduduk

Hasil estimasi jangka pendek adalah sebagai berikut :

$$\text{PAD} = -105.40203 + 0.1278007\text{Inv} - 5.2488912\text{Ak} + 12.680839\text{Pddk} + 0.3184396\text{PAD-1}$$

Sedangkan untuk estimasi jangka panjang, maka perlu dihitung terlebih dahulu koefisien jangka panjang PAM-nya yang diperoleh sebagai berikut :

Koefisien jangka panjang = koefisien jangka pendek / (1-λ)

Keterangan : λ = adalah koefisien penyesuaian

Besarnya λ adalah $1 - 0.3184396 = 0.6815604$

Sehingga diperoleh persamaan PAM jangka panjang sebagai berikut :

$$\text{PAD} = -154.6481134 + 0.187511921\text{Inv} - 7.701285462\text{Ak} + 18.60559827\text{Pddk} + 0.467221393$$

Seperti yang terlihat diatas koefisien jangka panjang ternyata lebih besar dari pada koefisien jangka pendek, itu artinya bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta mengalami peningkatan yang sangat lambat.

5.3. Pengujian Secara Parsial

Pengujian t atau pengujian secara individu ini akan membuktikan apakah hipotesa yang diberikan terhadap masing-masing variabel signifikan atau tidak signifikan. Mekanisme gambaran pengujian hipotesa tersebut yaitu :

$H_0 : b_i \leq 0 ; i = 1,2,3,4,\dots,k$

$H_a : b_i > 0 ; i = 1,2,3,4,\dots,k$ untuk koefisien yang bertanda positif

b_i = Menunjukkan nilai masing-masing koefisien variabel penjelas.

i = Menunjukkan variabel penjelas.

k = Menunjukkan jumlah variabel penjelas

H_0 = Menyatakan bahwa variabel yang diujikan secara individu tidak signifikan dan tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

H_a = Menyatakan bahwa variabel yang diujikan secara individu signifikan dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Untuk menentukan hasil pengujian maka kita dapat menentukan titik persentase distribusi t-tabel yaitu dengan level significance $\alpha = 5\%$. Apa bila pengujian t diperoleh hasil nilai t-hitung $>$ dari t-tabel (t-kritis) maka hipotesa nol (H_0) ditolak atau menerima H_a , dan jika t-hitung $<$ t-tabel maka

H_0 dapat diterima. T-tabel $t = (\alpha, n-k)$

$H_0 : b_i = 0$, koefisien b_i tidak signifikan

$H_a : b_i \neq 0$ koefisien b_i signifikan

Dalam pengujian individu atau uji t ini penulis menggunakan uji dua sisi :

- Hasil uji t untuk variabel Investasi dalam Negeri (X_1)

Dari hasil estimasi terlihat bahwa t-hitung untuk variabel X_1 adalah sebesar 3.3125738 sedangkan untuk t-tabel 2,179 dengan $\alpha = 0,05$ terlihat bahwa t-hitung > t-tabel dimana $3.3125738 > 2.179$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti variabel Investasi dalam Negeri berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- Hasil uji untuk variabel Angkatan kerja (X_2)

Dari hasil estimasi terlihat bahwa t-hitung untuk variabel X_2 adalah sebesar -2.5273435 sedangkan t-tabel 2.179 dengan $\alpha = 0.05$ sehingga t-hitung > t-tabel dimana $-2.5273435 > -2.179$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti variabel Angkatan kerja berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- Hasil uji untuk variabel Penduduk (X_3)

Dari hasil estimasi terlihat bahwa t-hitung untuk variabel X_3 adalah sebesar 1.8330525 sedangkan t-tabel 1.782 dengan $\alpha = 0,10$ sehingga t-hitung > t-tabel dimana $1.8330525 > 1.782$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti variabel Penduduk berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- Pengujian terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah periode sebelumnya ($X-1$)

nilai t-hitung dari variabel $X-1$ adalah sebesar 0.9461585 sedangkan t tabel 2.179 terlihat jelas bahwa t-hitung < tabel sehingga dapat dikatakan bahwa

variabel Pendapatan Asli Daerah periode sebelumnya tidak berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

5.2.3. Pengujian Secara Serentak

Uji kebersamaan ini untuk melihat seberapa besar variabel independen secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen. Dalam pengujian ini tingkat signifikansi adalah $\alpha = 5\%$ dan untuk nilai F-kritis dengan derajat kebebasan (k-1 , n-k).

Ho : b 1,2,3,4 Secara bersama-sama tidak mempengaruhi secara signifikan

Ha : b 1,2,3,4 Secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

F-kritis : 0,05 df (4-1 , 16-4)

0,05 df (3 , 12)

0,05 (3,49)

:3,49

F-hitung : 55.74531

Maka F hitung > F-kritis sehingga secara bersama-sama variabel independen (Investasi dalam Negeri, Jumlah Angkatan kerja, Jumlah Penduduk) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

5.2.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil estimasi regresi diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.957078 yang mempunyai arti bahwa variasi didalam variabel Pendapatan Asli

Daerah dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (Investasi Dalam Negeri, Jumlah Angkatan kerja, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah Periode sebelumnya).

5.2.5. Uji Penyesuaian

Untuk pengujian penyesuaian dengan rumus $1-\lambda$ terlihat dari hasil estimasi bahwa uji tidak signifikan dan nilai untuk Pendapatan Asli Daerah periode sebelumnya adalah sebesar 0.6815604. Berarti bahwa tidak ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah periode sebelumnya tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang akan datang Dalam hal ini berarti bahwa tidak terdapat penyesuaian dari Pendapatan Asli Daerah sebelumnya terhadap Pendapatan Asli Daerah yang akan datang.

5.3. Uji Asumsi Klasik

Didalam melakukan analisis estimasi dengan menggunakan model PAM yang merupakan model dinamis haruslah tidak menyimpang dari asumsi klasik yaitu tidak mengandung autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas sehingga hasil estimasi yang diperoleh dalam penaksiran adalah tidak bias.

5.3.1. Multikolinearitas

Salah satu asumsi regresi adalah bahwa tidak terdapat multikolinearitas didalam variabel yang menjelaskan yang termasuk didalam model.

Multikolinearitas yaitu adanya hubungan linier yang “sempurna” atau pasti diantara beberapa variabel yang menjelaskan dari dalam model.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan model *Klien's rule of Thumb* yaitu melakukan pengujian kepada masing-masing variabel independen untuk mengetahui nilai r^2 dari masing-masing hubungan antara variabel independen apakah $r^2 >$ atau $< R^2$ awal.

Dari hasil estimasi regresi antara variabel independen maka akan diperoleh nilai r^2 apabila nilai $r^2 > R^2$ maka estimasi tersebut mengandung multikolinearitas.

Untuk mendeteksi multikolinearitas maka akan ditunjukkan r^2 hasil estimasi variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam analisis, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.

Uji Multikolinearitas

Variabel Penjelas	r^2	R^2	Keterangan
LNX1-LNX2	0.090579	0.957078	Tidak terdapat Multikolinearitas
LNX1-LNX3	0.034229	0.957078	Tidak terdapat multikolinearitas
LNX1-LNY(-1)	0.041086	0.957078	Tidak terdapat multikolinearitas
LNX2-LNX1	0.090579	0.957078	Tidak terdapat multikolinearitas
LNX2-LNX3	0.053389	0.957078	Tidak terdapat multikolinearitas
LNX2-LNY(-1)	0.005013	0.957078	Tidak terdapat multikolinearitas
LNX3-LNX1	0.034229	0.957078	Tidak terdapat multikolinearitas
LNX3-LNX2	0.053389	0.957078	Tidak terdapat multikolinearitas
LNX3-LNY(-1)	0.941533	0.957078	Tidak terdapat multikolinearitas

LN(-1)-LX1	0.041086	0.957078	Tidak terdapat multikolinearitas
LN(-1)-LN2	0.005013	0.957078	Tidak terdapat multikolinearitas
LN(-1) LN3	0.941533	0.957078	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber : Data diolah

5.3.2. Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians. Konsekuensi heteroskedastisitas adalah biasanya varians sehingga uji signifikan menjadi valid. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan Uji Glesjer dilakukan dengan cara meregres nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel-variabel penjelas regresi model awal.

Dengan menentukan hipotesa yang menyatakan jika dari hasil perhitungan menghasilkan nilai t-hitung yang signifikan atau, jika t-hitung > t-tabel, maka dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ maka dapat diperoleh t-tabel = 2.179.

Tabel 5.3.2

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t-hitung	t-tabel	Keterangan
LN1	1.2429379	2.179	Tidak terdapat heteroskedastisitas
LN2	-0.7874206	2.179	Tidak terdapat heteroskedastisitas
LN3	0.2595648	2.179	Tidak terdapat heteroskedastisitas
LN(-1)	-0.1614555	2.179	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah

5.3.3. Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam analisis ini digunakan uji Durbin h dan tidak menggunakan uji Durbin Watson, mungkin tidak bisa digunakan untuk mendeteksi serial korelasi (Derajat Pertama) dalam model Autoregresif. Karena nilai d yang dihitung dalam model seperti ini biasanya cenderung mendekati 2, yang merupakan nilai d yang diharapkan dalam suatu urutan yang benar-benar random.

Untuk sampel besar statistik h mengikuti distribusi normal yang distandarisasikan yaitu distribusi normal dengan rata-rata nol dari varian satu. Sistem pengujian statistik h adalah sebagai berikut (Gujarati Damodar, 1995, 246)

$$h = (1 - \frac{1}{2} d) \sqrt{\frac{N}{1 - N[\text{var}(\alpha_2)]^2}}$$

dimana varian (α_2) diperoleh pengkuadratan nilai standar error.

$$h = [1 - \frac{1}{2} (2.425859)] \sqrt{\frac{16}{1 - 16(0.3184396)^2}}$$

$$h = 1.2129295 \sqrt{\frac{16}{-15(0.3184396)^2}}$$

$$h = 1.2129295 \sqrt{\frac{16}{-1.5210056683}}$$

$$h = 1.2129295 * (-3.243301269)$$

$$h = -3.933895786$$

Dari hasil model diatas, jika nilai h yang dihitung lebih kecil dari nilai h -kritis, maka kita bisa menerima hipotesa bahwa tidak ada serial korelasi (derajat pertama) dalam data.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas didapat nilai h sebesar -3.933895786 . Sedangkan untuk nilai distribusi normal yang sudah distandarisasikan diperoleh h -tabel sebesar 0.4505 . Karena h yang dihitung lebih kecil dari nilai kritis h maka menerima hipotesa bahwa tidak ada serial korelasi dalam data.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Secara bersama-sama variabel Investasi, Angkatan kerja, Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah periode sebelumnya mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.
2. Variabel Investasi dalam Negeri berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan koefisien positif, artinya setiap ada kenaikan Investasi akan diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah.
3. Variabel Angkatan kerja berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan koefisien negatif, artinya setiap ada kenaikan Angkatan kerja akan diikuti dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah
4. Variabel Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien positif, artinya setiap ada kenaikan jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja produktif yang akan diikuti dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
5. Variabel Pendapatan Asli Daerah periode sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien positif, artinya setiap ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah akan diikuti dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah.

6. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.957078 yang mempunyai arti bahwa variasi didalam variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas yang digunakan didalam model.
7. Dari hasil pengujian asumsi klasik terhadap masing-masing model, ternyata tidak terdapat gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi.

6.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada maka perlu disusun rencana tindakan yang harus dilakukan dalam rangka reformasi keuangan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1. Analisa kebutuhan keuangan Pemerintah Daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dengan menggali sumber-sumber pajak, termasuk bagi hasil pajak yang selama ini menjadi obyek pajak pusat.
3. Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik, Yogyakarta Dalam Angka, BPS, Yogyakarta 1985-2000
- Sriyana, Jaka, 1996 “*Peran Perencanaan Pembangunan Dalam Menghadapi Era Globalisasi*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 8 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Boediono *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1982.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 3, STIE YKPN, 1997.
- Josep Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Kuncoro Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997.
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta, 1992, hal 94.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, LPFEUI, Jakarta, 1985, cet-IV, hal 117.
- Achmad Lufian Amirul, *Implikasi Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Daerah Terhadap Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981-1996*, Skripsi Fak EK, tak diterbitkan, UII, Yogyakarta, 1999.
- Aris Budiyanto, *Analisis Hubungan Keuangan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Tahun 1980-1997*, Skripsi fak EK, tak diterbitkan, UII, Yogyakarta, 1999.
- Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Paul A Samuelson dan William D Nordhaus, *Makro Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal 108.

LAMPIRAN

DATA REGRESI SEBELUM DILOGKAN

obs	Y	X1	X2	X3	ABSU
1985	7768098.	89145824	1428529.	2916832.	0.002108
1986	10270621	44631172	1543524.	2948248.	0.000126
1987	9754255.	44016072	1539582.	2970751.	0.000422
1988	11053565	1.72E+08	1557231.	2981476.	0.001541
1989	12899362	70960960	1587267.	2998332.	0.000320
1990	15967963	4.94E+08	1535884.	3020837.	0.003316
1991	19142418	3.69E+08	1571361.	3044465.	0.002717
1992	22369506	1.53E+08	1594028.	3068004.	0.001589
1993	27207786	2.32E+08	1546471.	3096064.	0.025373
1994	39081196	4.08E+08	1589905.	3124286.	0.003231
1995	49905944	50086304	1491917.	3154265.	0.002255
1996	53497224	1.77E+08	1513978.	3185384.	0.003461
1997	61617600	2.37E+08	1556268.	3213502.	0.003400
1998	40594308	3161000.	1507040.	3237628.	0.001271
1999	57877500	68377976	1584106.	3264942.	0.001592
2000	40336592	1.20E+08	1701014.	3295127.	0.000567

DATA REGRESI SETELAH DILOGKAN

obs	ABSU	LX1	LX2	LX3	LY(-1)	LY
1986	0.000126	17.61394	14.24958	14.89672	15.86554	16.14480
1987	0.000422	17.60007	14.24702	14.90433	16.14480	16.09321
1988	0.001541	18.96023	14.25842	14.90793	16.09321	16.21826
1989	0.000320	18.07764	14.27752	14.91357	16.21826	16.37269
1990	0.003316	20.01875	14.24462	14.92104	16.37269	16.58610
1991	0.002717	19.72718	14.26745	14.92884	16.58610	16.76742
1992	0.001589	18.84852	14.28177	14.93654	16.76742	16.92321
1993	0.025373	19.26115	14.25149	14.94564	16.92321	17.11901
1994	0.003231	19.82557	14.27919	14.95472	17.11901	17.48115
1995	0.002255	17.72926	14.21557	14.96427	17.48115	17.72565
1996	0.003461	18.98895	14.23025	14.97408	17.72565	17.79514
1997	0.003400	19.28315	14.25780	14.98287	17.79514	17.93646
1998	0.001271	14.96640	14.22566	14.99035	17.93646	17.51914
1999	0.001592	18.04056	14.27553	14.99875	17.51914	17.87384
2000	0.000567	18.60209	14.34674	15.00796	17.87384	17.51277

HASIL REGRESI

HASIL REGRESI DATA AWAL SETELAH DILOGKAN

LS // Dependent Variable is LY

Date: 3-22-2002 / Time: 0:58

SMPL range: 1986 - 2000

Number of observations: 15

```
=====
```

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-105.40203	80.169836	-1.3147343	0.2180
LX1	0.1278007	0.0385805	3.3125738	0.0078
LX2	-5.2488912	2.0768413	-2.5273435	0.0300
LX3	12.680839	6.9178811	1.8330525	0.0967
LY(-1)	0.3184396	0.3365606	0.9461585	0.3664

```
=====
```

```
=====
```

R-squared	0.957078	Mean of dependent var	17.07126
Adjusted R-squared	0.939909	S.D. of dependent var	0.670335
S.E. of regression	0.164322	Sum of squared resid	0.270016
Log likelihood	8.845842	F-statistic	55.74537
Durbin-Watson stat	2.425859	Prob(F-statistic)	0.000001

```
=====
```

```
=====
```

Coefficient Covariance Matrix

```
=====
```

C,C	6427.203	C,LX1	-0.494540
C,LX2	80.51807	C,LX3	-535.3205
C,LY(-1)	25.70291	LX1,LX1	0.001488
LX1,LX2	-0.031419	LX1,LX3	0.064064
LX1,LY(-1)	-0.002512	LX2,LX2	4.313270
LX2,LX3	-9.989166	LX2,LY(-1)	0.464388
LX3,LX3	47.85708	LX3,LY(-1)	-2.287864
LY(-1),LY(-1)	0.113273		

```
=====
```

Residual Plot				obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
	:			*	:	1986	0.13509 16.1448 16.0097
	:	*		:	:	1987	-0.11349 16.0932 16.2067
	:	*		:	:	1988	-0.13171 16.2183 16.3500
	:			*	:	1989	0.12448 16.3727 16.2482
	*	:		:	:	1990	-0.22692 16.5861 16.8130
	:	*		:	:	1991	-0.05523 16.7674 16.8226
	:			*	:	1992	0.13262 16.9232 16.7906
	:	*		:	:	1993	-0.04836 17.1190 17.1674
	:			:	*	1994	0.20962 17.4812 17.2715
	:			*	:	1995	0.15172 17.7257 17.5739
	:	*		:	:	1996	-0.06508 17.7951 17.8602
	:			*	:	1997	0.04967 17.9365 17.8868
	:	*		:	:	1998	-0.12453 17.5191 17.6437
	:			*	:	1999	0.12542 17.8738 17.7484
	*	:		:	:	2000	-0.16332 17.5128 17.6761

UJI ASUMSI KLASIK

UJI
MULTIKOLINIERITAS

UJI MULTIKOLINEARITAS

LS // Dependent Variable is LX1
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:09
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-155.74569	153.13242	-1.0170655	0.3277
LX2	12.218904	10.738143	1.1378974	0.2757
R-squared	0.090579	Mean of dependent var		18.50290
Adjusted R-squared	0.020624	S.D. of dependent var		1.265189
S.E. of regression	1.252075	Sum of squared resid		20.37999
Log likelihood	-23.58285	F-statistic		1.294810
Durbin-Watson stat	1.707720	Prob(F-statistic)		0.275701

Coefficient Covariance Matrix

C,C	23449.54	C,LX2	-1644.354
LX2,LX2	115.3077		

Residual Plot

obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
1986	-0.75460	17.6139	18.3685
1987	-0.73724	17.6001	18.3373
1988	0.48365	18.9602	18.4766
1989	-0.63237	18.0776	18.7100
1990	1.71083	20.0188	18.3079
1991	1.14023	19.7272	18.5869
1992	0.08658	18.8485	18.7619
1993	0.86929	19.2611	18.3919
1994	1.09526	19.8256	18.7303
1995	-0.22377	17.7293	17.9530
1996	0.85657	18.9890	18.1324
1997	0.81413	19.2831	18.4690
1998	-3.10987	14.9664	18.0763
1999	-0.64509	18.0406	18.6857
2000	-0.95360	18.6021	19.5557

LS // Dependent Variable is LX1
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:09
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	114.17728	140.95107	0.8100491	0.4325
LX3	-6.4002638	9.4290806	-0.6787792	0.5092
R-squared	0.034229	Mean of dependent var		18.50290
Adjusted R-squared	-0.040062	S.D. of dependent var		1.265189
S.E. of regression	1.290283	Sum of squared resid		21.64280
Log likelihood	-24.03375	F-statistic		0.460741
Durbin-Watson stat	1.956713	Prob(F-statistic)		0.509182

Coefficient Covariance Matrix

C,C	19867.20	C,LX3	-1329.035
LX3,LX3	88.90756		

Residual Plot				obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
	*	:	:	1986	-1.22039	17.6139	18.8343
	*	:	:	1987	-1.18560	17.6001	18.7857
	:	*	:	1988	0.19763	18.9602	18.7626
	:	*	:	1989	-0.64888	18.0776	18.7265
	:	:	:*	1990	1.34009	20.0188	18.6787
	:	:	*:	1991	1.09838	19.7272	18.6288
	:	*	:	1992	0.26902	18.8485	18.5795
	:	:	*:	1993	0.73992	19.2611	18.5212
	:	:	:*	1994	1.36242	19.8256	18.4632
	:	*	:	1995	-0.67278	17.7293	18.4020
	:	:	*:	1996	0.64975	18.9890	18.3392
	:	:	:*	1997	1.00020	19.2831	18.2830
*	:	:	:	1998	-3.26868	14.9664	18.2351
	:	*	:	1999	-0.14075	18.0406	18.1813
	:	:	:*	2000	0.47968	18.6021	18.1224

LS // Dependent Variable is LX1
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:10
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	24.498498	8.0402920	3.0469662	0.0094
LY(-1)	-0.3534841	0.4736293	-0.7463308	0.4688
R-squared	0.041086	Mean of dependent var		18.50290
Adjusted R-squared	-0.032676	S.D. of dependent var		1.265189
S.E. of regression	1.285694	Sum of squared resid		21.48911
Log likelihood	-23.98030	F-statistic		0.557010
Durbin-Watson stat	1.901179	Prob(F-statistic)		0.468750

Coefficient Covariance Matrix

C,C	64.64629	C,LY(-1)	-3.804871
LY(-1),LY(-1)	0.224325		

Residual Plot		obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
*	:	1986	-1.27634	17.6139	18.8903
*	:	1987	-1.19150	17.6001	18.7916
:	*	1988	0.15043	18.9602	18.8098
:	*	1989	-0.68796	18.0776	18.7656
:	:	1990	1.30774	20.0188	18.7110
:	*	1991	1.09160	19.7272	18.6356
:	*	1992	0.27704	18.8485	18.5715
:	*	1993	0.74474	19.2611	18.5164
:	*	1994	1.37837	19.8256	18.4472
:	*	1995	-0.58993	17.7293	18.3192
:	*	1996	0.75619	18.9890	18.2328
:	*	1997	1.07495	19.2831	18.2082
*	:	1998	-3.19184	14.9664	18.1582
:	*	1999	-0.26520	18.0406	18.3058
:	*	2000	0.42171	18.6021	18.1804

LS // Dependent Variable is LX2
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:10
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	14.123411	0.1208030	116.91276	0.0000
LX1	0.0074130	0.0065147	1.1378974	0.2757
R-squared	0.090579	Mean of dependent var		14.26057
Adjusted R-squared	0.020624	S.D. of dependent var		0.031163
S.E. of regression	0.030840	Sum of squared resid		0.012364
Log likelihood	31.97340	F-statistic		1.294810
Durbin-Watson stat	1.119175	Prob(F-statistic)		0.275701

Coefficient Covariance Matrix

C,C	0.014593	C,LX1	-0.000785
LX1,LX1	4.24E-05		

Residual Plot				obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED	
	:	*		:		1986 -0.00441	14.2496	14.2540
	:	*		:		1987 -0.00686	14.2470	14.2539
	:	*		:		1988 -0.00554	14.2584	14.2640
	:		*	:		1989 0.02010	14.2775	14.2574
	:*		:	:		1990 -0.02719	14.2446	14.2718
	:	*		:		1991 -0.00220	14.2675	14.2696
	:		*	:		1992 0.01864	14.2818	14.2631
	:	*		:		1993 -0.01471	14.2515	14.2662
	:		*	:		1994 0.00881	14.2792	14.2704
	*:		:	:		1995 -0.03927	14.2156	14.2548
	*		:	:		1996 -0.03393	14.2303	14.2642
	:	*		:		1997 -0.00856	14.2578	14.2664
	:	*		:		1998 -0.00870	14.2257	14.2344
	:		*	:		1999 0.01838	14.2755	14.2571
	:		:	:		2000 0.08543	14.3467	14.2613

LS // Dependent Variable is LX2
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:11
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	11.317442	3.4371506	3.2926815	0.0058
LX3	0.1968847	0.2299321	0.8562731	0.4074
R-squared	0.053389	Mean of dependent var		14.26057
Adjusted R-squared	-0.019427	S.D. of dependent var		0.031163
S.E. of regression	0.031464	Sum of squared resid		0.012870
Log likelihood	31.67280	F-statistic		0.733204
Durbin-Watson stat	1.347614	Prob(F-statistic)		0.407354

Coefficient Covariance Matrix

C,C	11.81400	C,LX3	-0.790309
LX3,LX3	0.052869		

Residual Plot				obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
:	:	*	:	1986	-0.00080	14.2496	14.2504
:	:	*	:	1987	-0.00485	14.2470	14.2519
:	:	*	:	1988	0.00584	14.2584	14.2526
:	:	*	:	1989	0.02383	14.2775	14.2537
:	:	*	:	1990	-0.01055	14.2446	14.2552
:	:	*	:	1991	0.01075	14.2675	14.2567
:	:	*	:	1992	0.02356	14.2818	14.2582
:	:	*	:	1993	-0.00852	14.2515	14.2600
:	:	*	:	1994	0.01739	14.2792	14.2618
*	:	*	:	1995	-0.04810	14.2156	14.2637
*	:	*	:	1996	-0.03536	14.2303	14.2656
:	:	*	:	1997	-0.00954	14.2578	14.2673
*	:	*	:	1998	-0.04315	14.2257	14.2688
:	:	*	:	1999	0.00506	14.2755	14.2705
:	:	*	:	2000	0.07446	14.3467	14.2723

LS // Dependent Variable is LX2
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:11
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	14.208992	0.2017309	70.435361	0.0000
LY(-1)	0.0030411	0.0118834	0.2559130	0.8020
R-squared	0.005013	Mean of dependent var		14.26057
Adjusted R-squared	-0.071525	S.D. of dependent var		0.031163
S.E. of regression	0.032258	Sum of squared resid		0.013528
Log likelihood	31.29899	F-statistic		0.065491
Durbin-Watson stat	1.308150	Prob(F-statistic)		0.802023

Coefficient Covariance Matrix

C,C	0.040695	C,LY(-1)	-0.002395
LY(-1),LY(-1)	0.000141		

Residual Plot				obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED	
	:	*		:		1986 -0.00766	14.2496	14.2572
	:	*		:		1987 -0.01107	14.2470	14.2581
	:	*		:		1988 0.00049	14.2584	14.2579
	:			*		1989 0.01921	14.2775	14.2583
	:	*		:		1990 -0.01417	14.2446	14.2588
	:			*		1991 0.00802	14.2675	14.2594
	:			*		1992 0.02179	14.2818	14.2600
	:	*		:		1993 -0.00897	14.2515	14.2605
	:			*		1994 0.01813	14.2792	14.2611
	*	:		:		1995 -0.04658	14.2156	14.2622
	:	*		:		1996 -0.03265	14.2303	14.2629
	:	*		:		1997 -0.00531	14.2578	14.2631
	*	:		:		1998 -0.03788	14.2257	14.2635
	:			*		1999 0.01326	14.2755	14.2623
	:			:		2000 0.08339	14.3467	14.2633

LS // Dependent Variable is LX3
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:11
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	15.047460	0.1460989	102.99503	0.0000
LX1	-0.0053480	0.0078788	-0.6787792	0.5092
R-squared	0.034229	Mean of dependent var		14.94851
Adjusted R-squared	-0.040062	S.D. of dependent var		0.036572
S.E. of regression	0.037298	Sum of squared resid		0.018084
Log likelihood	29.12156	F-statistic		0.460741
Durbin-Watson stat	0.122241	Prob(F-statistic)		0.509182

Coefficient Covariance Matrix

C,C	0.021345	C,LX1	-0.001149
LX1,LX1	6.21E-05		

Residual Plot

obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
1986	-0.05654	14.8967	14.9533
1987	-0.04901	14.9043	14.9533
1988	-0.03813	14.9079	14.9461
1989	-0.03721	14.9136	14.9508
1990	-0.01936	14.9210	14.9404
1991	-0.01312	14.9288	14.9420
1992	-0.01012	14.9365	14.9467
1993	0.00119	14.9456	14.9445
1994	0.01328	14.9547	14.9414
1995	0.01162	14.9643	14.9526
1996	0.02818	14.9741	14.9459
1997	0.03854	14.9829	14.9443
1998	0.02293	14.9904	14.9674
1999	0.04777	14.9988	14.9510
2000	0.05998	15.0080	14.9480

LS // Dependent Variable is LX3
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:12
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	11.081473	4.5161314	2.4537536	0.0290
LX2	0.2711695	0.3166858	0.8562731	0.4074
R-squared	0.053389	Mean of dependent var		14.94851
Adjusted R-squared	-0.019427	S.D. of dependent var		0.036572
S.E. of regression	0.036926	Sum of squared resid		0.017726
Log likelihood	29.27186	F-statistic		0.733204
Durbin-Watson stat	0.101687	Prob(F-statistic)		0.407354

Coefficient Covariance Matrix

C,C	20.39544	C,LX2	-1.430192
LX2,LX2	0.100290		

Residual Plot

	obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
* :	1986	-0.04880	14.8967	14.9455
* :	1987	-0.04051	14.9043	14.9448
* :	1988	-0.03999	14.9079	14.9479
* :	1989	-0.03954	14.9136	14.9531
: *	1990	-0.02314	14.9210	14.9442
: *	1991	-0.02154	14.9288	14.9504
: *	1992	-0.01772	14.9365	14.9543
: *	1993	-0.00040	14.9456	14.9460
: *	1994	0.00116	14.9547	14.9536
: *	1995	0.02796	14.9643	14.9363
: *	1996	0.03380	14.9741	14.9403
: *	1997	0.03512	14.9829	14.9478
: *	1998	0.05131	14.9904	14.9390
: *	1999	0.04619	14.9988	14.9526
: *	2000	0.03608	15.0080	14.9719

LS // Dependent Variable is LX3
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:12
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	14.118853	0.0573899	246.01638	0.0000
LY(-1)	0.0489141	0.0033807	14.468790	0.0000
R-squared	0.941533	Mean of dependent var		14.94851
Adjusted R-squared	0.937035	S.D. of dependent var		0.036572
S.E. of regression	0.009177	Sum of squared resid		0.001095
Log likelihood	50.15499	F-statistic		209.3459
Durbin-Watson stat	0.988750	Prob(F-statistic)		0.000000

Coefficient Covariance Matrix

C,C	0.003294	C,LY(-1)	-0.000194
LY(-1),LY(-1)	1.14E-05		

Residual Plot				obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
	:	*	:	1986	0.00182	14.8967	14.8949
	:	*	:	1987	-0.00424	14.9043	14.9086
	:	*	:	1988	0.00189	14.9079	14.9060
	:	*	:	1989	0.00141	14.9136	14.9122
	:	*	:	1990	0.00134	14.9210	14.9197
	:	*	:	1991	-0.00131	14.9288	14.9301
	:	*	:	1992	-0.00248	14.9365	14.9390
	:	*	:	1993	-0.00099	14.9456	14.9466
	:	*	:	1994	-0.00150	14.9547	14.9562
	*:		:	1995	-0.00966	14.9643	14.9739
	*:		:	1996	-0.01180	14.9741	14.9859
	:	*	:	1997	-0.00641	14.9829	14.9893
	:	*	:	1998	-0.00585	14.9904	14.9962
	:		:	1999	0.02297	14.9988	14.9758
	:		:	2000	0.01482	15.0080	14.9931

LS // Dependent Variable is LY(-1)
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:13
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	19.112085	2.8879041	6.6179778	0.0000
LX1	-0.1162328	0.1557390	-0.7463308	0.4688
R-squared	0.041086	Mean of dependent var		16.96144
Adjusted R-squared	-0.032676	S.D. of dependent var		0.725496
S.E. of regression	0.737254	Sum of squared resid		7.066061
Log likelihood	-15.63848	F-statistic		0.557010
Durbin-Watson stat	0.123012	Prob(F-statistic)		0.468750

Coefficient Covariance Matrix

C,C	8.339990	C,LX1	-0.448781
LX1,LX1	0.024255		

Residual Plot

obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
1986	-1.19923	15.8655	17.0648
1987	-0.92158	16.1448	17.0664
1988	-0.81507	16.0932	16.9083
1989	-0.79261	16.2183	17.0109
1990	-0.41256	16.3727	16.7852
1991	-0.23304	16.5861	16.8191
1992	-0.15385	16.7674	16.9213
1993	0.04990	16.9232	16.8733
1994	0.31131	17.1190	16.8077
1995	0.42979	17.4812	17.0514
1996	0.82071	17.7257	16.9049
1997	0.92439	17.7951	16.8708
1998	0.56396	17.9365	17.3725
1999	0.50396	17.5191	17.0152
2000	0.92393	17.8738	16.9499

LS // Dependent Variable is LY(-1)
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:13
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-6.5437774	91.848679	-0.0712452	0.9443
LX2	1.6482660	6.4407278	0.2559130	0.8020
R-squared	0.005013	Mean of dependent var		16.96144
Adjusted R-squared	-0.071525	S.D. of dependent var		0.725496
S.E. of regression	0.750993	Sum of squared resid		7.331883
Log likelihood	-15.91544	F-statistic		0.065491
Durbin-Watson stat	0.118528	Prob(F-statistic)		0.802023

Coefficient Covariance Matrix

C,C	8436.180	C,LX2	-591.5710
LX2,LX2	41.48297		

Residual Plot

obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
1986	-1.07778	15.8655	16.9433
1987	-0.79431	16.1448	16.9391
1988	-0.86468	16.0932	16.9579
1989	-0.77112	16.2183	16.9894
1990	-0.56245	16.3727	16.9351
1991	-0.38668	16.5861	16.9728
1992	-0.22897	16.7674	16.9964
1993	-0.02325	16.9232	16.9465
1994	0.12690	17.1190	16.9921
1995	0.59388	17.4812	16.8873
1996	0.81419	17.7257	16.9115
1997	0.83827	17.7951	16.9569
1998	1.03257	17.9365	16.9039
1999	0.53304	17.5191	16.9861
2000	0.77038	17.8738	17.1035

LS // Dependent Variable is LY(-1)
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:14
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-270.77759	19.886931	-13.615856	0.0000
LX3	19.248680	1.3303587	14.468790	0.0000
R-squared	0.941533	Mean of dependent var		16.96144
Adjusted R-squared	0.937035	S.D. of dependent var		0.725496
S.E. of regression	0.182047	Sum of squared resid		0.430836
Log likelihood	5.341503	F-statistic		209.3459
Durbin-Watson stat	1.045055	Prob(F-statistic)		0.000000

Coefficient Covariance Matrix

C,C	395.4900	C,LX3	-26.45668
LX3,LX3	1.769854		

Residual Plot				obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
	:	*		1986	-0.09911	15.8655	15.9647
	:		*	1987	0.03379	16.1448	16.1110
	:	*		1988	-0.08717	16.0932	16.1804
	:	*		1989	-0.07063	16.2183	16.2889
	:	*		1990	-0.06014	16.3727	16.4328
	:		*	1991	0.00329	16.5861	16.5828
	:		*	1992	0.03636	16.7674	16.7311
	:		*	1993	0.01690	16.9232	16.9063
	:		*	1994	0.03804	17.1190	17.0810
	:			1995	0.21637	17.4812	17.2648
	:			1996	0.27190	17.7257	17.4537
	:		*	1997	0.17221	17.7951	17.6229
	:		*	1998	0.16956	17.9365	17.7669
	*	:		1999	-0.40947	17.5191	17.9286
	*	:		2000	-0.23191	17.8738	18.1058

UJI
HETEROSKEDASTISITAS

UJI HETEROSKEDASTISITAS

LS // Dependent Variable is ABSU
 Date: 3-25-2002 / Time: 11:09
 SMPL range: 1985 - 2000
 Number of observations: 15

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-0.1395633	3.2874202	-0.0424537	0.9670
LX1	0.0019664	0.0015820	1.2429379	0.2422
LX2	-0.0670586	0.0851623	-0.7874206	0.4493
LX3	0.0736314	0.2836726	0.2595648	0.8005
LY(-1)	-0.0022282	0.0138009	-0.1614555	0.8750
R-squared	0.153328	Mean of dependent var		0.003412
Adjusted R-squared	-0.185341	S.D. of dependent var		0.006189
S.E. of regression	0.006738	Sum of squared resid		0.000454
Log likelihood	56.75650	F-statistic		0.452736
Durbin-Watson stat	2.096540	Prob(F-statistic)		0.768643

Coefficient Covariance Matrix

C,C	10.80713	C,LX1	-0.000832
C,LX2	0.135389	C,LX3	-0.900124
C,LY(-1)	0.043219	LX1,LX1	2.50E-06
LX1,LX2	-5.28E-05	LX1,LX3	0.000108
LX1,LY(-1)	-4.22E-06	LX2,LX2	0.007253
LX2,LX3	-0.016796	LX2,LY(-1)	0.000781
LX3,LX3	0.080470	LX3,LY(-1)	-0.003847
LY(-1),LY(-1)	0.000190		

Residual Plot

obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
1986	-0.00090	0.00013	0.00103
1987	-0.00069	0.00042	0.00111
1988	-0.00186	0.00154	0.00340
1989	-0.00020	0.00032	0.00052
1990	-0.00344	0.00332	0.00675
1991	-0.00203	0.00272	0.00475
1992	-0.00063	0.00159	0.00222
1993	0.01999	0.02537	0.00539
1994	-0.00164	0.00323	0.00487
1995	-0.00266	0.00225	0.00491
1996	-0.00312	0.00346	0.00658
1997	-0.00240	0.00340	0.00580
1998	0.00156	0.00127	-0.00029
1999	-0.00236	0.00159	0.00396
2000	0.00039	0.00057	0.00017